



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017

BAB I

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bupati selaku kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran (TA) 2017 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang dirubah dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD, tanggal 5 April 2007. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem yaitu untuk:

1. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem;
2. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana; dan
3. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan TA 2017 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
7. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);

1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- 2.1 Pemerintahan
- 2.2 Entitas Pelaporan
- 2.3 Entitas Akuntansi
- 2.4 Badan Layanan Umum
- 2.5 Perusahaan Daerah

Bab III Kebijakan Keuangan (Fiskal) dan Ekonomi Makro

- 3.1 Kebijakan Keuangan (Fiskal)
- 3.2 Ekonomi Makro

Bab IV Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

- 4.1 APBD dan Perubahannya
- 4.2 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
- 4.3 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Bab V Kebijakan Akuntansi

- 5.1 Asumsi Dasar dan Basis Pengukuran
- 5.2 Kebijakan Akuntansi Pokok

Bab VI Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 6.1 Penjelasan Pos Neraca
- 6.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 6.3 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 6.4 Penjelasan Pos Laporan Operasional
- 6.5 Penjelasan Pos Laporan Arus Kas
- 6.6 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 6.7 Pengungkapan Informasi untuk Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja

Bab VII Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

BAB II

Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

2.1 Pemerintahan

2.1.1 Letak Geografis

Karangasem adalah salah satu dari sembilan kabupaten di Provinsi Bali, yang terletak diantara 08°00'00" - 08°41'37,8"LS dan 115°35'9,8" - 115°54'8,9"BT di ujung Timur Pulau Bali. Berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng disebelah Barat, Laut Bali di sebelah Utara, Selat Lombok di sebelah Timur, serta Samudra Indonesia di sebelah Selatan. Luas Kabupaten Karangasem adalah 839,54 km² atau 14,90% dari luas Provinsi Bali yang mempunyai luas 5.632,86 km².

2.1.2 Dasar Hukum Pembentukan

Sebagai sebuah kabupaten, Karangasem dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Karangasem terletak di Kota Amlapura sekaligus sebagai ibu kota kabupaten. Kabupaten Karangasem merupakan daerah otonom yang menjadi bagian dari Provinsi Bali.

2.1.3 Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Karangasem merupakan bagian integral dari Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, sebagai Daerah Otonom. Pemerintah Kabupaten Karangasem mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Karangasem dibagi menjadi 8 (delapan) Kecamatan, 3 (tiga) Kelurahan, 75 Desa Dinas, 554 Banjar Dinas, 52 Lingkungan, 190 Desa Adat/Pakraman dan 716 Banjar Adat (berdasarkan data Karangasem Membangun Tahun 2016). Domisili Kantor Pemerintah Kabupaten Karangasem berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 31, Amlapura.

Kepala Daerah (Bupati) selaku pemimpin Kabupaten Karangasem pada saat penyusunan laporan ini adalah I Gusti Ayu Mas Sumatri, Sos, MAP dan dibantu oleh Wakil Bupati, I Wayan Artha Dipa, SH, MA. Tahun 2016 merupakan awal masa jabatan kepala daerah yang dipilih untuk masa jabatan 2016 - 2021.

2.2 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan

pada Pemerintah Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 tahun 2016 adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem yang mempunyai kewajiban untuk menyusun konsolidasi Laporan Keuangan Entitas Akuntansi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2017.

2.3 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Laporan keuangan Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan data keuangan yang disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni para pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 tahun 2016 ditetapkan Pengguna anggaran dan pengguna barang tersebut terdiri dari: 2 Sekretariat (Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah dengan 10 Unit Bagian), 23 Dinas, 5 Badan, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 1 unit RSUD, 1 Inspektorat, dan 8 Kecamatan.

2.4 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karangasem baru bisa diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem sesuai Peraturan Bupati Karangasem Nomor 11 Tahun 2010. BLUD RSUD menyajikan Laporan Keuangan BLUD serta RSUD sebagai entitas akuntansi menyajikan Laporan Keuangan RSUD yang memuat BLUD didalamnya.

2.5 Perusahaan Daerah

Pemerintah Kabupaten Karangasem membentuk suatu perusahaan daerah yang ditujukan untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Karangasem dan dikelola secara profesional yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem. PDAM Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1976. Modal PDAM Kabupaten Karangasem seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.

BAB III

Kebijakan Keuangan (Fiskal) dan Ekonomi Makro

3.1 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan, serta dengan mempertimbangkan kondisi, potensi daerah, maka arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang ditempuh adalah pemulihan perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemulihan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diupayakan melalui peningkatan investasi, konsumsi masyarakat, peningkatan ekspor termasuk peningkatan sektor pariwisata, peningkatan peran UMKM, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan.

Pembangunan ekonomi bertumpu pada tiga sektor andalan yaitu sektor pertanian dalam arti luas, industri kecil, menengah dan koperasi serta sektor pariwisata. Ketiga sektor ini disamping mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian daerah, juga mampu membuka peluang berusaha, peluang kerja serta peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.1.1 Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Karangasem adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Transfer dari Pemerintah lainnya (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Lainnya) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Dalam penetapan PAD agar ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun lalu, peningkatan dari potensi pendapatan obyek yang ada, kebijakan pemerintah, dan faktor keamanan. Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan, serta dengan mempertimbangkan kondisi, potensi daerah, maka arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang ditempuh adalah pemulihan perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemulihan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diupayakan melalui peningkatan investasi, konsumsi masyarakat, peningkatan ekspor termasuk peningkatan sektor pariwisata, peningkatan peran UMKM, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan.

Pembangunan ekonomi bertumpu pada tiga sektor andalan yaitu : sektor pertanian dalam arti luas, industri kecil, menengah dan koperasi serta sektor pariwisata. Ketiga sektor ini disamping mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian daerah, juga mampu membuka peluang berusaha, peluang kerja serta peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja pemerintah tidak terganggu maka pemerintah melakukan upaya-upaya antara lain:

- 1) Mengintensifkan penerimaan dari pajak maupun retribusi melalui peningkatan manajemen pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
- 2) Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah;
- 3) Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian

dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya; dan

- 4) Menjaga dan mengembangkan stabilisasi ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

3.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggungjawabnya.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan arah kebijakan ditekankan pada upaya antara lain: (1) peningkatan penanggulangan kemiskinan, (2) peningkatan akses dan pemerataan pendidikan, (3) peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, (4) peningkatan kualitas pertumbuhan pertanian, perikanan dan kehutanan, (5) peningkatan ekonomi lokal dengan mengembangkan usaha skala mikro, (6) peningkatan produktifitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif, (7) serta meningkatkan pelayanan infrastruktur.

Dengan berbagai kemajuan yang dicapai tahun sebelumnya, permasalahan dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahan sosial yang dihadapi masih diwarnai dengan permasalahan kemiskinan, pengangguran, kekeringan dan kesempatan kerja, yang lebih lanjut mengakibatkan keterbatasan kemampuan dalam mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sedangkan dari aspek sosial lainnya seperti pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Pembangunan pendidikan sampai saat ini masih menghadapi masalah dan tantangan yang terkait dengan pemerataan pendidikan, baik pendidikan dasar dan menengah, yang ditandai dengan tingkat kesenjangan partisipasi pendidikan yang lebih lebar antar kelompok. Sedangkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan adalah ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan dan rendahnya jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin. Disisi lain kualitas pelayanan sosial dasar kepada masyarakat belum sesuai harapan, keterbatasan jangkauan dan kemampuan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat, sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial merupakan tantangan lain yang harus dihadapi. Adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial telah mendorong bergesernya paradigma pembangunan kesejahteraan sosial kearah yang lebih mengedepankan peran aktif masyarakat, baik secara perorangan maupun berkelompok.
- 2) Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi daerah sudah menunjukkan perkembangan kearah yang lebih baik, namun masih perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan keberhasilan agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu karakteristik perekonomian daerah dominan dipengaruhi oleh sektor pariwisata, sehingga bila terjadi gangguan terhadap sektor ini maka otomatis mempengaruhi tingkat kemajuan ekonomi daerah. Hal ini memperhatikan investasi sektor pariwisata sangat dipengaruhi oleh sektor penataan ruang khususnya di 3 kawasan pariwisata.

Permasalahan lainnya adalah pengembangan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang diharapkan dapat menyangga perekonomian daerah, belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini diakibatkan berbagai permasalahan seperti masih banyaknya lahan-lahan yang belum produktif akibat ketersediaan air, masih rendahnya produktivitas pertanian dan mutu produk pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan, belum bagusnya pemasaran komoditas spesifik daerah dan masih rendahnya minat investasi untuk pengembangan di bidang pertanian.

- 3) Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, secara umum masih ada beberapa wilayah terpencil, sedangkan kondisi jalan kabupaten cukup memadai. Dengan panjang jalan lebih dari 600 km, tantangan kedepan adalah memelihara kondisi jalan tersebut agar tetap berfungsi optimal. Namun demikian untuk pengembangan wilayah secara keseluruhan, maka kedepan diperlukan peningkatan infrastuktur transportasi yang dapat menstimulir terciptanya keseimbangan antar wilayah.

Air baku, baik untuk air minum maupun pertanian dan peternakan, masih menjadi permasalahan, terutama untuk wilayah-wilayah kering. Pembangunan sistem penyediaan air baku dihadapkan pada masalah sumber mata air. Sumber mata air berada disebagian wilayah saja dan berada umumnya lebih rendah dari wilayah pelayanan.

Penataan ruang merupakan salah satu alat untuk mengendalikan perkembangan pembangunan. Pengendalian pemanfaatan ruang masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi berbagai peraturan yang berlaku dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mematuhi peraturan terkait penataan ruang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka strategi pembangunan daerah antara lain adalah:

- 1) Memantapkan pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui pencapaian makro ekonomi yang lebih baik dan berkualitas;
- 2) Menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi pembangunan ekonomi terutama sektor unggulan daerah;
- 3) Memberikan peluang yang lebih besar bagi penduduk miskin untuk berprestasi dalam pelaksanaan pembangunan;
- 4) Meningkatkan akses dan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan; dan
- 5) Meningkatkan pemanfaatan potensi pariwisata di kawasan strategis kabupaten.

Berdasarkan pada kondisi dan permasalahan maka prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2017 adalah:

- 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- 2) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran;
- 3) Kesehatan;
- 4) Pendidikan;
- 5) Infrastruktur;
- 6) Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana;
- 7) Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 8) Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- 9) Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM; dan
- 10) Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk menutupi kekurangan dana baik untuk keperluan belanja langsung, belanja tidak langsung maupun pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan.

3.2 Ekonomi Makro

Berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 903/5360/Bappeda/Nomor 903/266/DPRD tanggal 29 Nopember 2016 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Nomor 903/5361/Bappeda/Nomor 903/267/DPRD tanggal 29 Nopember 2016 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD TA 2017, serta Nomor 903/1980/Bappelitbangda Nomor 903/326/DPRD tanggal 11 Oktober 2017 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Nomor 903/1981/Bappedalitbangda Nomor 903/327/DPRD tanggal 11 Oktober 2017 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, prioritas pembangunan daerah harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing – masing daerah. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD. Kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat beberapa indikator penting yang menjadi fokus kebijakan pemerintah diantaranya pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, serta mengatasi pengangguran dan menekan kesenjangan ekonomi.

Pembangunan Kabupaten Karangasem tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan pemerintah Pusat dan Provinsi disamping kondisi ekonomi Global, adanya regulasi pusat terkait efisiensi dan efektivitas anggaran, dan adanya penegakan Perda 17 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Karangasem terkait Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan, yang menyebabkan menurunnya beberapa produktivitas unggulan Kabupaten Karangasem secara tidak langsung mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Karangasem.

Beberapa indikator kondisi ekonomi makro yang dijadikan pertimbangan dalam penyusunan APBD tahun 2017 berdasarkan data terakhir tahun 2016 adalah sebagai berikut:

3.2.1 Asumsi Ekonomi Makro

Asumsi makro ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 Kabupaten Karangasem adalah:

- 1) Kondisi perekonomian daerah tetap stabil;
- 2) Penerimaan daerah tidak mengalami penurunan;
- 3) Perkembangan industri kepariwisataan semakin membaik dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata;
- 4) Meningkatnya investasi;
- 5) Tidak terjadinya kenaikan harga BBM; dan
- 6) Stabilitas keamanan tetap kondusif.

3.2.2 Lain-lain Asumsi

- 1) Peningkatan penanaman modal daerah (PMD) dan penanaman modal asing (PMA), serta meningkatnya ekspor khususnya ekspor barang akan memberikan efek positif bagi sektor industri serta beberapa sektor yang merupakan efek dari kegiatan ekspor ini.
- 2) Dinamika dan realita kondisi umum daerah, yang didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015;
 - b. Capaian-capaian pada tahun sebelumnya; dan
 - c. Isu strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani yaitu masih tingginya angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, merupakan daerah potensi rawan bencana (letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, kekeringan, angin puting beliung), masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia.

3.2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem Tahun 2016 mengalami perlambatan dimana laju pertumbuhan PDRB Tahun 2015 berdasarkan harga konstan sebesar 6,00 persen melambat menjadi 5,92 persen di Tahun 2016.

Pertumbuhan ekonomi Karangasem pada tahun 2016 tidak terlepas dari pertumbuhan sektor-sektor yang menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Karangasem. Dari tujuh belas sektor ekonomi, dilihat dari Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2000, hampir semua sektor mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2016. Hanya sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,51%. hal ini merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan perlambatan ekonomi Kabupaten Karangasem pada Tahun 2016.

3.2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem Tahun 2016 sebesar 5,92% atas dasar harga konstan. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan Tahun 2015 yang mencapai 6,00% maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem mengalami perlambatan sebesar 0,08%.

Perkembangan PDRB Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2016 sebagaimana tabel berikut:

**PDRB Kabupaten Karangasem Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015-2016**

No	Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)		PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Juta Rupiah)	
		2015	2016	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.242.067,95	3.555.168,07	2.392.039,83	2.444.595,23
B	Pertambangan dan Penggalian	473.552,59	491.726,28	338.773,92	337.035,07
C	Industri Pengolahan	506.182,28	550.021,29	381.588,17	397.754,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.353,72	11.433,84	8.010,80	8.654,75
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.480,34	17.238,40	13.680,10	14.739,27
F	Konstruksi	703.134,84	777.725,47	535.832,32	580.315,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	653.913,43	728.048,70	493.943,24	527.704,50
H	Transportasi dan Pergudangan	2.181.918,59	2.405.369,99	1.394.895,39	1.525.882,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.321.462,65	1.469.530,98	777.586,07	841.331,63
J	Informasi dan Komunikasi	367.160,14	412.247,67	345.083,98	377.521,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	555.990,51	606.118,49	408.656,07	433.197,46
L	Real Estate	516.748,78	560.155,68	418.679,65	439.219,11
M,N	Jasa Perusahaan	85.622,71	96.551,96	67.983,34	71.700,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	922.161,99	1.022.880,03	827.920,84	884.468,95
P	Jasa Pendidikan	278.629,26	322.297,25	221.128,08	240.125,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	222.786,09	254.324,80	180.362,80	197.186,70
R,S,T,U	Jasa Lainnya	247.662,39	282.821,10	186.112,27	203.234,59
PDRB		12.303.828,25	13.563.660,01	8.992.278,88	9.524.666,77

Sumber: BPS Kabupaten Karangasem

Berdasarkan atas harga berlaku, nilai absolute PDRB Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 mencapai 13.563.660,01 juta rupiah meningkat 1.259.831,76 juta rupiah (10,24%) dibandingkan dengan Tahun 2015 yang besarnya 12.303.828,25 juta rupiah. Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016 terjadi hampir pada semua sektor ekonomi, kecuali pada sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan.

**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem Tahun 2016
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010**

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB	
		Harga Berlaku (%)	Harga Konstan 2010 (%)
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	7,30	2,20
B	Pertambangan dan Penggalian	4,37	-0,51
C	Industri Pengolahan	4,24	4,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,14	8,04
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,37	7,73
F	Konstruksi	2,13	8,30

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB	
		Harga Berlaku (%)	Harga Konstan 2010 (%)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,21	6,84
H	Transportasi dan Pergudangan	0,78	9,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,78	8,20
J	Informasi dan Komunikasi	2,63	9,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,84	6,01
L	Real Estate	3,33	4,91
M,N	Jasa Perusahaan	6,92	5,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,83	6,83
P	Jasa Pendidikan	6,52	8,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,42	9,33
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,58	9,20
Laju Pertumbuhan PDRB		4,08	5,92

Sumber: BPS Kabupaten Karangasem

Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu Sektor Informasi dan Komunikasi (9,40%), Sektor Transportasi dan Pergudangan (9,39%), Sektor Kesehatan dan Kegiatan Sosial (9,33%) disusul oleh sektor-sektor lain.

3.2.5 Struktur Perekonomian

Pada Tahun 2016, struktur perekonomian daerah Kabupaten Karangasem masih didominasi oleh sektor tersier dengan kontribusi sebesar 60,16%, meningkat sebesar 0,39% dibandingkan Tahun 2015 yang besarnya 59,77%.

Sektor sekunder sebesar 10,00%, mengalami penurunan sebesar 0,03% dibandingkan Tahun 2015 yang besarnya 10,03%. Sedangkan sektor primer kontribusinya sebesar 29,84%, turun sebesar 0,36% dibandingkan Tahun 2015 yang besarnya 30,20%. Hal ini sedikit sesuai dengan harapan pembangunan di bidang ekonomi yaitu meningkatnya sektor sekunder dan tersier serta menurunnya peranan sektor primer namun nilai absolut tetap tinggi.

Nilai PDRB Kabupaten Karangasem dan Kontribusi Sektor Atas Dasar Harga Belaku Tahun 2015-2016

Sektor	2015		2016	
	Nilai (Milyar Rp)	Kontribusi (%)	Nilai (Milyar Rp)	Kontribusi (%)
Primer	3.715,62	30,20	4.046,89	29,84
Sekunder	1.234,15	10,03	1.356,42	10,00
Tersier	7.354,06	59,77	8.160,35	60,16
PDRB	12.303,83	100,00	13.563,66	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

Atas dasar kondisi ekonomi makro tersebut, penyusunan APBD 2017 dan perubahannya dilakukan dan diupayakan realistis sesuai kebutuhan dan kemampuan nyata daerah dengan memperhatikan skala prioritas dalam penyusunan program dan kegiatan.

3.2.6 Inflasi

Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah Kabupaten Karangasem maka laju inflasi harus dapat dikendalikan agar daya beli masyarakat dapat terjangkau, dimana kisaran inflasi dianggap ideal yaitu dibawah 10%. Pada tahun 2015 berdasarkan data ekspose dari BI laju inflasi Kabupaten Karangasem disetarakan dengan laju rata-rata inflasi tahunan di Provinsi Bali yang mengacu pada perhitungan inflasi yang terjadi di kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng. Dimana inflasi pada tahun 2015 sebesar 1,68%, tahun 2014 sebesar 8,43%, tahun 2013 mencapai 7,35%, sedangkan tahun 2012 laju inflasi mencapai 4,71% dan tahun 2011 inflasi mencapai 3,75%.

BAB IV
Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

4.1 APBD dan Perubahannya

Target kinerja APBD Tahun 2017 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan

No	Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan	1.553.327.397.903,55	1.547.841.503.604,76	(5.485.894.298,79)	(0,35)
01.01	Pendapatan Asli Daerah	233.653.019.710,95	180.202.138.829,09	(53.450.880.881,86)	(22,88)
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	138.301.371.000,00	83.386.371.000,00	(54.915.000.000,00)	(39,71)
01.01.02	Hasil Retribusi Daerah	11.236.990.000,00	10.494.269.768,72	(742.720.231,28)	(6,61)
01.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	12.862.600.710,95	11.450.865.530,25	(1.411.735.180,70)	(10,98)
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	71.252.058.000,00	74.870.632.530,12	3.618.574.530,12	5,08
01.02	Dana Perimbangan	974.180.548.194,00	973.729.851.305,48	(450.696.888,52)	(0,05)
01.02.01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.557.964.000,00	28.763.173.305,48	3.205.209.305,48	12,54
01.02.02	Dana Alokasi Umum	759.506.567.194,00	722.184.384.000,00	(37.322.183.194,00)	(4,91)
01.02.03	Dana Alokasi Khusus	189.116.017.000,00	222.782.294.000,00	33.666.277.000,00	17,80
01.03	Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	345.493.829.998,60	393.909.513.470,19	48.415.683.471,59	14,01
01.03.01	Pendapatan Hibah	56.872.100.000,00	56.929.184.152,00	57.084.152,00	0,10
01.03.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	112.994.622.798,60	124.383.657.051,88	11.389.034.253,28	10,08
01.03.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	71.182.742.000,00	71.182.742.000,00	-	-
01.03.05	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	104.444.365.200,00	139.729.558.163,31	35.285.192.963,31	33,78
01.03.07	Sumbangan Pihak Ketiga	-	1.684.372.103,00	1.684.372.103,00	-

Dari data tersebut di atas diketahui terdapat penurunan anggaran pendapatan pada perubahan APBD sebesar Rp5.485.894.298,79 atau 0,35%. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan realisasi sumber-sumber pendapatan yang terjadi yaitu dari semua jenis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum karena perubahan peraturan yang diterapkan serta terjadi keadaan diluar kendali pemerintahan yaitu status awas erupsi Gunung Agung. Berdasarkan realisasi ini perlu dilakukan penyesuaian proyeksi APBD agar bisa selaras dengan target Belanja Daerah. Namun peningkatan pendapatan daerah juga terjadi pada penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus serta semua jenis Pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah. Peningkatan dan Penurunan anggaran pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Target pajak daerah mengalami penurunan dibandingkan induk 2017, penurunan paling banyak dialami oleh target pajak mineral bukan logam dan batuan. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan status Gunung Agung, yang mana lokasi usaha penggalan mineral bukan logam berada dekat dengan lokasi Gunung Agung;
- 2) Target retribusi daerah secara umum mengalami penurunan dibandingkan target induk. Disatu sisi ada kenaikan dari retribusi pelayanan kesehatan namun ada beberapa target retribusi yang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena

perkembangan ekonomi secara makro mengalami penurunan yang mana salah satu penyebabnya adalah peningkatan status Gunung Agung;

- 3) Estimasi target pendapatan yang bersumber dari laba/keuntungan dari investasi pada beberapa perusahaan daerah mengalami penurunan dibandingkan target induk. Hal ini karena menurunnya pendapatan maupun laba yang diperoleh dari perusahaan daerah sehingga berimplikasi terhadap penyetoran bagian dari deviden maupun keuntungan yang menjadi hak pemerintah;
- 4) Target Lain - lain PAD yang sah mengalami kenaikan dari target induk. Kenaikan ini sebagian besar bersumber dari meningkatnya estimasi target pendapatan BLUD RSUD;
- 5) Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak mengalami kenaikan dibandingkan dari target induk yang mana target pendapatan ini berdasarkan Perpres Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN TA 2017 serta termasuk juga adanya pendapatan kewajiban/alokasi kurang bayar TA 2016;
- 6) Dana Alokasi Umum mengalami penurunan dibandingkan target induk. Hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN TA 2017 serta adanya anggaran transfer dari pemerintah pusat yang bersifat dinamis;
- 7) Dibandingkan dengan anggaran induk, pendapatan Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan yang begitu signifikan. Kenaikan ini bersumber dari alokasi kurang bayar/kewajiban DAK dari pemerintah pusat akibat penundaan anggaran transfer TA 2016;
- 8) Pendapatan hibah mengalami kenaikan dibandingkan dari target induk. Kenaikan ini bersumber terutama dari pendapatan hibah BOS dan hibah air minum;
- 9) Dibandingkan dengan anggaran induk, target pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi dan Pemda Lainnya pada perubahan mengalami kenaikan. Kenaikan ini bersumber dari alokasi kurang bayar/kewajiban Pemerintah Provinsi Bali TA 2016;
- 10) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya mengalami kenaikan yang begitu signifikan dibandingkan dengan induk. Kenaikan ini terutama yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung; dan
- 11) Sumbangan Pihak Ketiga bersumber dari sumbangan kelompok masyarakat/masyarakat dan organisasi dalam rangka membantu upaya penanggulangan bencana erupsi Gunung Agung.

b. Anggaran Belanja

No	Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Belanja	1.573.795.979.535,61	1.650.700.646.406,31	76.904.666.870,70	4,89
02.01	Belanja Tidak Langsung	891.028.314.041,88	896.969.350.536,55	5.941.036.494,67	0,67
02.01.01	Belanja Pegawai	698.490.516.990,48	29.633.760.014,00	(10.075.525.593,00)	0,87
02.01.02	Belanja Bunga	1.500.000.000,00	700.000.000,00	(800.000.000,00)	(53,33)
02.01.04	Belanja Hibah	12.063.000.000,00	12.063.000.000,00	-	-
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	1.810.000.000,00	1.810.000.000,00	-	-
02.01.06	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	14.953.836.100,00	9.484.943.389,79	(5.468.892.710,21)	(36,57)
02.01.07	Belanja Bantuan	160.210.960.951,40	166.457.834.764,43	6.246.873.813,03	3,90

No	Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
	Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa				
02.01.08	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.900.000.000,00	(100.000.000,00)	(5,00)
02.02	Belanja Langsung	682.767.665.493,73	753.731.295.869,76	70.963.630.376,03	10,39
02.02.01	Belanja Pegawai	39.709.285.607,00	29.633.760.014,00	(10.075.525.593,00)	(25,37)
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	408.098.355.522,73	427.629.151.877,66	19.530.796.354,93	4,79
02.02.03	Belanja Modal	234.960.024.364,00	296.468.383.978,10	61.508.359.614,10	26,18

Anggaran belanja mengalami peningkatan sebesar Rp76.904.666.870,70 atau 4,89% yang terjadi pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal yang disebabkan oleh peningkatan kegiatan pelayanan masyarakat, pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur daerah, penanggulangan bencana daerah akibat status awas erupsi Gunung Agung. Selain jenis belanja diatas target belanja mengalami penurunan disesuaikan dengan target pendapatan daerah serta kebutuhan belanja untuk program dan kegiatan yang lebih prioritas. Peningkatan dan penurunan anggaran belanja daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Anggaran belanja pegawai mengalami kenaikan dibandingkan dengan anggaran induk. Hal ini disebabkan guna memenuhi amanat PP Nomo 18 Tahun 2017;
- 2) Anggaran belanja bunga mengalami penurunan dibandingkan anggaran induk disebabkan karena telah selesainya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga;
- 3) Belanja bagi hasil yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami penurunan dibanding induk, disebabkan oleh menurunnya target pajak dan retribusi daerah dalam perubahan APBD;
- 4) Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa mengalami kenaikan dari anggaran induk. Hal ini terutama untuk memenuhi kewajiban atas pelaksanaan pembayaran sharing JKBM TA 2016;
- 5) Mengalami penurunan dibandingkan anggaran induk. Hal ini disebabkan karena adanya pergeseran sebagian anggaran Belanja Tidak Terduga ke Belanja Langsung; dan
- 6) Belanja Langsung mengalami kenaikan dibanding anggaran induk. Baik dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal.

c. Anggaran Pembiayaan

No	Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
3	Pembiayaan				
03.01	Penerimaan Pembiayaan daerah	45.068.581.632,06	125.644.340.402,55	80.575.758.770,49	178,78
03.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.068.581.632,06	125.644.340.402,55	80.575.758.770,49	178,78
03.02	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24.600.000.000,00	22.785.197.601,00	(1.814.802.399,00)	(7,38)
03.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	-	-
03.02.03	Pembayaran Pokok Utang	21.000.000.000,00	19.185.197.601,00	(1.814.802.399,00)	(8,64)
	Pembiayaan Neto	20.468.581.632,06	102.859.142.801,55	82.390.561.169,49	402,52

Anggaran pembiayaan mengalami kenaikan dan penurunan dari:

- 1) SILPA mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan anggaran induk. SILPA ini bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan penghematan belanja TA 2016; dan
- 2) Anggaran Pembayaran Pokok Hutang sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan anggaran induk. Hal ini disebabkan karena estimasi pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga telah selesai tahun 2017.

4.2 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan adalah bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam membelanjai seluruh kebutuhan belanjanya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan tingkat kemandirian yang tinggi pada akhirnya dapat menekan/mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik Provinsi maupun Pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Berdasarkan langkah tersebut dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

4.2.1 Rencana dan Realisasi Kinerja Keuangan

Ringkasan perbandingan antara realisasi dengan anggaran Tahun 2017 sebagaimana disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	APBD	Realisasi	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan	1.547.841.503.604,76	1.525.935.905.692,07	(21.905.597.912,69)	98,58
2	Belanja	1.650.700.646.406,31	1.506.221.682.564,41	(144.478.963.841,90)	91,25
	Surplus/(Defisit)	(102.859.142.801,55)	19.714.223.127,66	122.484.313.018,34	(19,08)
3	Pembiayaan				
A	Penerimaan Pembiayaan	125.644.340.402,55	125.239.937.529,69	(404.402.872,86)	99,68
B	Pengeluaran Pembiayaan	22.785.197.601,00	22.771.070.518,64	(14.127.082,36)	99,94
	Pembiayaan Neto	102.859.142.801,55	102.468.867.011,05	(390.275.790,50)	100,06
	SILPA	0,00	122.183.090.138,71	122.547.089.442,24	0,00

Uraian tentang penyebab terjadinya kekurangan dan kelebihan pos-pos pendapatan diuraikan pada Bab VI, sedangkan penyebab rendahnya realisasi belanja dibandingkan dengan anggarannya disebabkan oleh karena adanya efisiensi dalam pengeluaran belanja operasi dan belanja modal.

4.2.2 Tren Kinerja Keuangan

Realisasi pendapatan dan belanja selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam juta)

No	Uraian	2017	2016	2015	2014	2013
I	Pendapatan	1.525.935,90	1.462.024,35	1.367.577,57	1.248.392,02	1.041.577,61
II	Belanja	1.506.221,68	1.450.826,44	1.351.846,28	1.164.216,36	1.078.485,76
	Surplus/Defisit	19.714,22	11.197,91	15.731,29	84.175,66	(36.908,15)
III	Pembiayaan					
1	Penerimaan	125.239,94	142.694,80	155.856,07	101.416,98	147.340,37

No	Uraian	2017	2016	2015	2014	2013
2	Pengeluaran	22.771,07	28.248,37	28.726,38	29.748,37	9.035,25
Pembiayaan Netto		102.468,87	114.446,43	127.129,69	71.668,61	138.305,13
SILPA		122.183,09	125.644,34	142.860,98	155.844,27	101.396,97

4.2.2.1 Pendapatan

Berdasarkan data di atas, realisasi pendapatan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Peningkatan pendapatan tersebut juga ditopang oleh PAD Kabupaten Karangasem. Dalam tahun 2017 PAD Kabupaten Karangasem mengalami penurunan karena terjadi kejadian Luar Biasa Erupsi Gunung Agung yang berpengaruh terhadap perekonomian di Kabupaten Karangasem. Perbandingan realisasi PAD dari Tahun 2013 sampai 2017 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam juta)

No	Uraian	2017	2016	2015	2014	2013
1	Pajak Daerah	96.850,26	117.782,19	139.626,19	138.541,75	103.841,04
2	Retribusi Daerah	12.590,47	15.984,98	14.255,16	13.022,20	11.991,69
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.519,62	13.592,31	13.535,06	17.064,08	15.235,41
4	Lain-lain PAD yang sah	77.703,32	85.284,54	75.709,51	70.796,97	37.584,65
Jumlah		198.663,67	232.644,01	243.125,92	239.425,00	168.652,79

Secara umum kondisi realisasi PAD Kabupaten Karangasem Tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016 baik dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Hal ini disebabkan masyarakat tidak bisa beraktifitas secara normal dimana sebagaimana masyarakat Kabupaten Karangasem harus meninggalkan tempat tinggal/mengungsi mengikuti arahan dari Instansi berwenang untukantisipasi keselamatan jika terjadi bencana. Sehingga hampir tidak ada aktivitas ekonomi selama beberapa kurun waktu tertentu pada saat status awas erupsi Gunung Agung. Yang juga sangat dirasakan adalah kunjungan wisatawan yang cenderung sedikit pada saat itu. Langkah-langkah pemulihan segera diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian disamping tindakan-tindakan dalam rangka penanggulangan bencana dan pengungsi.

Untuk dana perimbangan, baik dari pusat dan provinsi, tingkat pencapaiannya sangat tergantung pada instansi vertikal tersebut. Hal ini pun tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang sangat mempengaruhi pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tingkat pencapaiannya tergantung dari hibah Pemerintah Pusat serta dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Karangasem menerima Sumbangan dari Masyarakat yang ditujukan sebagai dana tanggap darurat serta penanggulangan bencana erupsi Gunung Agung.

4.2.2.2 Belanja

Gambaran realisasi belanja secara total dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran

belanja selalu dikaitkan dengan prioritas kebutuhan dan ketersediaan dana. Secara ringkas uraian belanja selama Tahun 2013 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam juta)

No	Uraian	2017	2016	2015	2014	2013
1	Belanja Operasi	1.093.006,80	1.088.388,73	1.032.815,77	910.375,33	833.884,76
2	Belanja Modal	237.069,89	190.437,98	178.424,64	177.557,76	180.737,65
3	Belanja Tak Terduga	826,04	163,68	584,26	-	3.100,60
4	Belanja Transfer	175.318,95	171.836,05	140.021,60	76.283,27	60.762,76
Jumlah		1.506.221,68	1.450.826,44	1.351.846,28	1.164.216,36	1.078.485,76

Berdasarkan jumlah realisasi belanja di atas dapat diungkapkan bahwa belanja operasi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan belanja barang yang didalamnya terdapat barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, hibah kepada masyarakat, dan bantuan sosial kepada masyarakat, belanja modal mengalami peningkatan sesuai dengan pemenuhan kebutuhan akan sarana prasarana demi kenyamanan masyarakat demikian pula belanja tak terduga meningkat yang digunakan untuk membiayai keadaan tanggap darurat bencana serta pengembalian pendapatan tahun sebelumnya.

Demikian juga belanja transfer cenderung meningkat setiap tahunnya, kondisi ini terjadi seiring dengan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun-tahun tersebut sebagai dasar perhitungan bagi hasil ke desa/kelurahan. Sedangkan dalam Tahun 2017 transfer bagi hasil ke desa yang bersumber dari dana perimbangan pusat dan provinsi sebesar Rp9.484.943.389,38.

4.2.2.3 Pembiayaan

Ringkasan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam juta)

No	Uraian	2017	2016	2015	2014	2013
1	Penerimaan	125.239,94	142.694,80	155.856,07	101.416,98	147.340,37
2	Pengeluaran	22.771,07	28.248,37	28.726,38	29.748,37	9.035,25

Berdasarkan data tersebut dapat diungkapkan bahwa telah terjadi fluktuasi penerimaan pembiayaan secara terus menerus. Unsur utama dari penerimaan pembiayaan adalah penggunaan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SILPA) tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi batas minimal pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan setiap tahun relatif fluktuatif, secara rutin pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-pemerintah pusat, pokok pinjaman dalam negeri-lainnya selebihnya adalah penanaman modal pemerintah. Penanaman modal dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber-sumber PAD dan sangat tergantung dengan kemampuan kas daerah.

4.2.3 Derajat Kemandirian

Berdasarkan realisasi APBD dapat diukur tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan menggunakan ukuran beberapa rasio atau perbandingan sebagai berikut:

4.2.3.1 PAD terhadap Belanja

Perbandingan PAD terhadap jumlah belanja adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja}} = \frac{198.663.672.239,22}{1.506.221.682.564,41} \times 100\% = 13,19\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem hanya mampu mendanai belanja sebesar 13,19% sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi.

4.2.3.2 PAD terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD terhadap jumlah belanja operasi adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{198.663.672.239,22}{1.093.006.801.197,60} \times 100\% = 18,18\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem hanya mampu mendanai belanja operasi sebesar 18,17%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa untuk menjaga kelangsungan operasi pelaksanaan pemerintahan pun belum dapat didanai dengan PAD.

4.2.3.3 PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Belanja

Perbandingan PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap jumlah belanja adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{PAD + Bagi Hasil Pajak+Bukan Pajak}}{\text{Belanja}} = \frac{337.261.442.572,32}{1.506.221.682.564,41} \times 100\% = 22,39\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem ditambah dengan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak hanya mampu menutupi belanja sebesar 14,73%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Karangasem baik yang dipungut sendiri maupun melalui pemerintah pusat belum dapat menutupi kebutuhan belanja pemerintah.

4.2.3.4 PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap jumlah belanja operasi adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{PAD + Bagi Hasil Pajak+Bukan Pajak}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{337.261.442.572,32}{1.093.006.801.197,60} \times 100\% = 30,86\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem ditambah dengan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak hanya mampu menutupi belanja operasi sebesar 20,29%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Karangasem baik yang dipungut sendiri maupun melalui pemerintah pusat belum dapat menutupi kebutuhan operasional pemerintahan.

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah masih cukup rendah, sehingga ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi masih cukup besar.

Perkembangan ukuran kemandirian terutama berdasarkan realisasi PAD yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	
						Realisasi	Target
1	PAD	15,64	15,64	17,98	16,03	13,19	10,92
	Belanja						
2	PAD	19,76	19,76	21,02	18,66	18,18	15,32
	Belanja Operasi						

Dari data tersebut bahwa pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki tingkat kemandirian yang lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2016. Hal ini disebabkan karena adanya jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan menurun dibandingkan dengan belanja yang dikeluarkan. Hal ini disebabkan kondisi luar biasa erupsi Gunung Agung yang terjadi di Kabupaten Karangasem.

Khusus Tahun 2017, rasio kemandirian yang ditargetkan sebesar 10,92% untuk menopang belanja dan 15,32% untuk menopang belanja operasi berhasil direalisasi dengan tingkat capaian masing-masing sebesar 13,19% dan 18,18%. Capaian ini didukung oleh adanya upaya efisiensi dan penghematan dalam pengeluaran belanja.

4.3 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja keuangan, khususnya bidang pendapatan. Tahun 2017 masih banyak wajib pajak yang belum menyelesaikan tunggakan pajak baik pajak hotel, restoran dan pajak hiburan, pajak reklame dan PBB P2 yang baru pada Tahun 2014 diserahkan ke daerah. Hal tersebut mengakibatkan masih tingginya saldo piutang pajak.

Kinerja keuangan, bidang belanja Tahun 2017 tidak mengalami kendala yang berarti. Secara umum belanja dilakukan dalam batas pagu anggaran yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan dan efisiensi dalam pengeluaran belanja.

Kinerja Penerimaan Pembiayaan sesuai dengan target yang dianggarkan dalam Tahun 2017. Sedangkan kinerja pengeluaran pembiayaan dilakukan dalam batas pagu yang dianggarkan.

Penjelasan capaian kinerja setiap jenis pendapatan dan belanja dapat dilihat pada Bab VI.

Sehubungan dengan beberapa kendala tersebut, beberapa langkah yang akan dilakukan dalam Tahun 2017 adalah:

- 1) Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi atas potensi pajak dan retribusi yang ada di Kabupaten Karangasem;
- 2) Memberikan stimulan/rangsangan kepada wajib pajak yang membayar pajak secara tepat waktu dengan pemberian hadiah;
- 3) Menata dan mengkaji produk hukum pendapatan daerah;
- 4) Mengembangkan sarana dan prasarana pendapatan;
- 5) Meningkatkan SDM dalam bidang pendapatan;
- 6) Mengadakan penjajagan dan pendataan obyek pendapatan baru; dan

- 7) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan pendapatan daerah.

BAB V

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi ditetapkan untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2017 juga telah mengalami perubahan.

5.1 Asumsi Dasar dan Basis Pengukuran

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Karangasem Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Kemandirian Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai entitas pelaporan;
- 2) Kesinambungan Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem berlanjut keberadaannya/berkesinambungan;
- 3) Pengukuran dalam Rupiah, Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang Rupiah;
- 4) Dasar kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah;
- 5) Dasar akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Eksistensi Aset, Pendapatan dan Beban dipengaruhi oleh transaksi penerimaan dan pengeluaran dari Kas Daerah (transaksi kas), juga dipengaruhi oleh transaksi non kas;
- 6) Asas Bruto, Prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
- 7) Harga Perolehan (*historical cost*), Nilai aset diakui sebesar harga perolehan yaitu seluruh pembayaran yang dilakukan pada waktu memperoleh barang tersebut, mulai harga pembelian/pengadaan barang tersebut ditambah biaya-biaya lainnya (jika ada) yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap di tempat dan siap digunakan;
- 8) Periode Akuntansi, Informasi disajikan berdasarkan periode akuntansi dengan memakai tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017; dan
- 9) Dana Umum (kecuali aset), Pertanggungjawaban keseluruhan penerimaan dan pengeluaran termasuk aset, utang dan ekuitas, pada prinsipnya adalah melalui dana umum berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun khusus untuk aset, apabila terdapat perolehan aset berupa hibah dan *dropping* dari pemerintah

pusat/instansi lebih tinggi atau pihak lain yang tidak melalui mekanisme APBD, sepanjang terdapat perpindahan hak kepemilikan, tetap diakui sebagai aset daerah.

5.2 Kebijakan Akuntansi Pokok

5.2.1 Pendapatan – LO

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
- 3) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- 4) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia; dan
- 5) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

5.2.2 Pendapatan – LRA

- 1) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
- 2) Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
 - d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
 - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- 3) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
- 5) Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai ekuitas dana umum.
- 6) Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima.

- 7) Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

5.2.3 Beban – LO

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 3) Beban diukur sesuai dengan:
 - a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
 - b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- 4) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

5.2.4 Belanja - LRA

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja diklasifikasikan menurut penggunaan dan pusat pertanggungjawaban dan dirinci berdasarkan kelompok dan jenis belanja.
- 3) Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah.
- 4) Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
 - c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 5) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 6) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah; dan
- 7) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

5.2.5 Transfer

- 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 2) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
- 3) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- 4) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar;
- 5) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa;
- 6) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar;
- 7) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 8) Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

5.2.6 Pembiayaan

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
- 2) Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan, sumber-sumber pembiayaan terdiri dari sumber yang berupa penerimaan dan sumber yang berupa pengeluaran daerah;
- 3) Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman/obligasi, penerimaan kembali pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah antara lain pembayaran utang pokok dan penyertaan modal pemerintah (investasi);
- 5) Pusat pertanggungjawaban adalah bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah;

- 6) Pembiayaan diakui selama periode berjalan, saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah atau pada saat kas dikeluarkan untuk sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah;
- 7) Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan;
- 8) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan dikeluarkan; dan
- 9) Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan.

5.2.7 Aset/Aktiva

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya; dan
- 2) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

5.2.7.1 Aset Lancar

- 1) Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi;
- 2) Aset lancar terdiri atas: kas, piutang, persediaan, dan lain-lain;
- 3) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan;
- 4) Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang;
- 5) Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
- 6) Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dan sebagainya.
- 7) Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan;
- 8) Piutang dicatat sebesar nilai nominal, dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk dapat menyajikan piutang sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan harus dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih yang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang;
- 9) Penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kualitas piutang dilakukan dengan menggunakan taksiran persentase atas besaran piutang yang kemungkinan tidak tertagih, dengan besaran sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	1%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

- 10) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi;
- 11) Persediaan terdiri atas: bahan habis pakai kantor, obat-obatan, dan lain-lain; dan
- 12) Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir untuk persediaan selain obat dan harga real untuk persediaan obat-obatan.

5.2.7.2 Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Investasi jangka panjang antara lain terdiri dari:
 - a. Penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.
 - b. Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam bentuk Dana Bergulir.
- 3) Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan prosentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
- 4) Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir dan investasi jangka panjang yang sifatnya nonpermanen diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*);
- 5) Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterimakan kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*)

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 tahun	10%
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 tahun	50%
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 tahun	75%
4	Jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun	100%

- 6) Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat kepemilikan.

5.2.7.3 Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik;

- 2) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya;
- 3) Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Konstruksi dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya;
- 4) Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya;
- 5) Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, Bangunan air, meliputi bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya;
- 6) Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya;
- 7) Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, persenjataan, kendaraan darat bermotor, kendaraan darat tak bermotor, kendaraan apung bermotor, kendaraan apung tak bermotor, pesawat udara dan lain-lain sejenisnya;
- 8) Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan kayu dan lain-lain sejenis;
- 9) Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan;
- 10) Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan;
- 11) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya;
- 12) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah;
- 13) Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi;
- 14) Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan;
- 15) Jalan, Irigasi dan Jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun sampai dengan siap untuk digunakan;
- 16) Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk digunakan;
- 17) Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain kontraktor. Biaya ini juga

mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola (jika ada);

- 18) Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan
- 19) Aset Tetap lainnya diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan;
- 20) Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan; dan
- 21) Aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus, mulai Tahun 2015, seiring dengan pemberlakuan PP Nomor 71 Tahun 2010, tanpa memperhitungkan sisa umur ekonomis.

5.2.7.4 Dana Cadangan

- 1) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran; dan
- 2) Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembentukan dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pencairan dana cadangan.

5.2.7.5 Aset Lainnya

- 1) Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan;
- 2) Aset lain-lain meliputi piutang angsuran, Kemitraan dengan pihak III, dan lain-lain;
- 3) Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah;
- 4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. Ataupun kemitraan dengan pihak lain (Bank) sehubungan kerjasama dalam bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak yang dituangkan juga dalam bentuk perjanjian;
- 5) Piutang angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset;
- 6) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan pada saat dibangun (aset lainnya tersebut selesai dibangun) atau aset tersebut disetujui penempatannya sesuai dengan perjanjiannya;
- 7) Aset Lain-lain adalah aset tetap yang tidak digunakan karena kondisi/digolongkan sebagai rusak berat/tidak dapat digunakan maka aset tersebut dipisahkan dan disajikan ke aset lain-lain sebesar nilai buku (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dalam neraca;

5.2.8 Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- 2) Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
- 3) Kewajiban jangka pendek (lancar) merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan;
- 4) Utang jangka pendek antara lain terdiri dari Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Lain yang Ditanggungkan dan Biaya yang Masih Harus Dibayar;
- 5) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- 6) Utang PFK adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- 7) Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi;
- 8) Utang jangka panjang merupakan pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat;
- 9) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan;
- 10) Utang PFK, Pendapatan Lain yang Ditanggungkan, Biaya yang Masih Harus Dibayar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan;
- 11) Utang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan atau nilai sisa hutang yang belum jatuh tempo dalam waktu 12 bulan mendatang; dan
- 12) Utang jangka pendek dan utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang Rupiah yang harus dibayar kembali, dalam mata uang Rupiah.

5.2.9 Ekuitas

- 1) Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban; dan
- 2) Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

5.2.10 Kebijakan Khusus untuk Aset Tetap

- 1) Nilai perolehan Aset Tetap yang masih 0 atau Rp1,00 dikoreksi dengan nilai wajar pada tanggal perolehan;
- 2) Kebijakan penyusutan diberlakukan dalam Tahun 2017, seiring dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang didalam PP Nomor 71 Tahun 2010;

Untuk memudahkan perhitungan tarif penyusutan dan konsistensi penerapannya di masa mendatang, masa manfaat aset tetap diestimasi dalam koridor sebagai berikut:

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat(Tahun)
1	Peralatan dan Mesin	5 – 10
2	Gedung dan Bangunan	25
3	Jalan, irigasi, dan jaringan	12
4	Aset tetap lainnya	0

- 3) Pada tahun 2015 diterapkan penghitungan penyusutan tanpa nilai residu. Langkah ini dimulai dari penghitungan penyusutan 2014, langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan sisa umur ekonomis aset tetap per 31 Desember 2014 sebagai dasar pembagi perhitungan penyusutan 2014. Sisa umur aset tetap dihitung dengan cara mengurangi umur manfaat dengan tahun perolehan. Namun untuk Tahun selanjutnya penyusutan aset tetap tanpa memperhitungkan umur ekonomis, disusutkan dengan membagi nilai aset tetap dengan umur ekonomis sesuai masa manfaatnya. Mengingat operasional Organisasi Sektor Publik lebih mengutamakan pelayanan publik dibanding dengan investasi, maka penyusutan dari waktu ke waktu tidak lebih besar dari pada tambahan investasi Pemda. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi penurunan yang cukup drastis atas nilai aset tetap di neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- 4) Selanjutnya dalam penghitungan penyusutan tanpa penggunaan nilai residu aset tetap. Setelah memperoleh nilai perolehan dan umur ekonomis, maka Penyusutan Tahun 2017 dihitung sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan 2017} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

- 5) Penyusutan aset yang diperoleh dalam Tahun 2017 dan tahun berikutnya dilakukan secara garis lurus sesuai dengan umur manfaat; dan
- 6) Terhadap aset tetap yang tidak digunakan, maka aset tersebut dipisahkan dan disajikan ke Aset Lain-lain sebesar nilai buku (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dalam neraca.

BAB VI
Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

6.1 Penjelasan Pos Neraca

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1 Aset	Rp1.543.062.430.875,70	Rp1.472.026.534.807,33
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:		
- Aset Lancar	Rp	195.368.290.118,89
- Investasi Jangka Panjang	Rp	104.049.025.463,37
- Aset Tetap	Rp	1.231.346.825.291,29
- Dana Cadangan	Rp	0,00
- Aset Lainnya	Rp	12.298.290.002,15
- Jumlah Aset	Rp	1.543.062.430.875,70

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.1 Aset Lancar	Rp195.368.290.118,89	Rp204.507.613.188,10
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:		
- Kas di Kas Daerah	Rp	107.201.056.359,84
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	88.108.990,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
- Kas di Bendahara BLUD	Rp	2.926.579.789,00
- Kas di Bendahara FKTP Puskesmas	Rp	8.831.301.662,33
- Kas di Bendahara BOS	Rp	1.793.348.663,70
- Kas di Peduli Gunung Agung Karangasem	Rp	50.000,00
- Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana	Rp	1.342.644.673,74
- Piutang	Rp	59.656.861.919,05
- Beban Dibayar Dimuka	Rp	23.720.833,33
- Persediaan	Rp	13.504.617.227,80
- Jumlah Aset Lancar	Rp	195.368.290.118,89

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah	Rp107.201.056.359,84	Rp118.968.370.356,36
Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017 yang berada di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem. Rincian transaksi atas akun Kas di Kas Daerah sebagai berikut:		
- Saldo awal	Rp	118.968.370.356,36
- Mutasi kredit rekening	Rp	1.401.787.032.355,48
- Mutasi debit rekening	Rp	(1.413.554.346.352,00)
- Saldo Akhir	Rp	107.201.056.359,84

Saldo akhir Kas di Kas Daerah tersebut diatas telah tertuang dalam Rekonsiliasi Bank antara Bank BPD Bali dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai BUD dan SKPKD per 31 Desember 2017.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat saldo pada rekening bank dan dipegang secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran OPD.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan	Rp88.108.990,00	Rp187.741.882,76

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2017 yang terdiri dari:

- Kas di Bendahara Penerimaan BLU RSUD Karangasem	Rp	77.260.490,00
- Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Abang 2	Rp	409.500,00
- Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Karangasem 2	Rp	1.102.500,00
- Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Manggis 1	Rp	1.332.000,00
- Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Kubu 1	Rp	352.000,00
- Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Kubu 2	Rp	10.000,00
- Kas di Bendahara Penerimaan RS Pratama	Rp	<u>7.642.500,00</u>
- Saldo Akhir	Rp	88.108.990,00

Saldo kas di bendahara penerimaan disebabkan pelayanan RSUD dan puskesmas masih berlangsung sampai tanggal 31 Desember 2017 dan pihak bank tidak melayani transaksi tunai pada tanggal tersebut.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD	Rp2.926.579.789,00	Rp3.131.930.393,54

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara BLU RSUD Kabupaten Karangasem per tanggal 31 Desember 2017. Jumlah tersebut sesuai dengan yang tertera pada Rekening Koran BLU RSUD Kabupaten Karangasem. Rincian transaksi atas akun Kas di BLU RSUD Kabupaten Karangasem sebagai berikut:

- Saldo awal	Rp	3.131.930.393,54
- Pendapatan BLUD	Rp	53.911.213.932,46
- Belanja BLUD	Rp	<u>(54.116.564.537,00)</u>
- Saldo Akhir	Rp	2.926.579.789,00

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.1.5 Kas di Bendahara JKN	Rp8.831.301.662,33	Rp1.541.936.233,38

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Puskesmas - Puskesmas di Kabupaten Karangasem sebagai penampung dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2017. Rincian transaksi atas Kas di Bendahara FKTP di Puskesmas sebagai berikut:

- Saldo awal	Rp	1.541.936.233,38
- Pendapatan FKTP	Rp	16.252.337.700,00
- Belanja FKTP	Rp	<u>(8.957.972.271,05)</u>
- Saldo akhir Kas di Bendahara JKN	Rp	8.836.301.662,33
- Pembayaran Utang kepada rekanan	Rp	<u>5.000.000,00</u>
- Saldo Akhir	Rp	8.831.301.662,33

Pada Tahun 2016 telah dibentuk rekening bank atas nama Bendahara Dana JKN RS Pratama Kubu sejalan dengan beroperasinya RS Pratama Kubu dengan nomor rekening 022 01.05.00235-4 pada BPD Bali Cabang Karangasem. Dana kapitasi yang sudah ditransfer oleh BPJS Kesehatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp505.000,00.

Rincian kas di Bendahara JKN dapat dilihat pada *lampiran 1*.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.1.6 Kas di Bendahara BOS	Rp1.793.348.663,70	Rp2.008.315.919,27
Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per tanggal 31 Desember 2017. Rincian transaksi Kas di Bendahara BOS sebagai berikut:		
- Saldo awal	Rp	2.008.315.919,27
- Koreksi kesalahan pencatatan tahun lalu	Rp	2.831.635,46
- Saldo awal setelah koreksi	Rp	2.005.484.283,81
- Alokasi Dana BOS	Rp	55.837.129.173,52
- Belanja BOS	Rp	(55.596.920.690,00)
- Kas di Bendahara BOS SMA/SMK	Rp	(453.052.214,40)
- Koreksi bunga tabungan yang belum dicatat	Rp	708.110,77
- Saldo Akhir	Rp	1.793.348.663,70

Terdapat perbedaan pencatatan saldo Kas Bendahara BOS SMP 1 Atap SD 1 Bunutan sebesar Rp19.608.000,00 antara Laporan Keuangan dengan bukti pendukung (Rekening Koran Per 31 Desember 2017 dan uang tunai yang dipegang oleh Bendahara BOS) dengan rincian sebagai berikut:

- Rekening Koran + Uang Tunai	Rp	20.422.759,23
- Pencatatan di Laporan Keuangan	Rp	814.759,23
- selisih	Rp	19.608.000,00

Selisih sebesar Rp19.608.000,00 merupakan jumlah uang yang ditransfer pihak sekolah kepada CV. STAR RI pada tanggal 27 November 2017 atas belanja LKS, namun karena kesalahan teknis pihak penyedia, uang sejumlah Rp19.608.000,00 ditransfer kembali kepada pihak sekolah pada tanggal 27 November 2017. Selanjutnya uang tersebut akan ditransfer kembali kepada pihak penyedia pada tahun anggaran berikutnya.

Rincian Kas di Bendahara BOS dapat dilihat pada *lampiran 2*.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.1.7 Kas di Peduli Gunung Agung Karangasem	Rp50.000,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Peduli Gunung Agung Karangasem per tanggal 31 Desember 2017. Kas tersebut ditampung dalam rekening Peduli Gunung Agung Karangasem dengan nomor rekening tabungan 022.02.02.44480-8 sesuai SK Bupati Karangasem Nomor 575/HK/2017 tentang Penetapan Rekening Bank Peduli Gunung Agung Karangasem pada Pemerintah Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 September 2017. Sampai tanggal 31 Desember 2017 jumlah sumbangan masyarakat untuk penanggulangan bencana erupsi Gunung Agung sebesar Rp3.026.830.966,74 dicatat dalam Pendapatan Lainnya Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Rincian transaksi Kas di Peduli Gunung Agung sebagai berikut:

- Penerimaan Sumbangan Masyarakat	Rp	3.026.830.966,74
- Transfer ke Kas Daerah	Rp	1.684.372.103,00

- Transfer ke Rekening Bendahara Penanggulangan Bencana di BPBD	Rp	1.342.408.863,74
- Saldo Akhir	Rp	50.000,00

Untuk kegiatan mitigasi bencana, tanggap darurat serta penanggulangan belanja yang dibiayai dari dana sumbangan masyarakat dilaksanakan oleh RSUD dan BPBD sesuai uraian berikut:

Instansi	Program/Kegiatan		Jumlah Alokasi Anggaran
RSUD	Program Pelayanan Rujukan Kesehatan	Rp	150.000.000,00
	Pelayanan Rujukan Pasien	Rp	150.000.000,00
BPBD	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp	1.201.101.322,00
	Sarana dan Prasarana evakuasi pengungsi dari ancaman bencana alam	Rp	318.857.719,00
	Kegiatan Mitigasi Bencana	Rp	832.243.103,00
	Pengadaan Logistik di Pos Komando	Rp	50.000.500,00
	Program Peringatan Dini	Rp	333.270.781,00
	Pembangunan Sistem Peringatan Dini	Rp	333.270.781,00
	Jumlah	Rp	1.684.372.103,00

Untuk kelancaran penanganan pengungsi erupsi Gunung Agung dan penanganan tanggap darurat bencana berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Forkopinda Kabupaten Karangasem Nomor 400/1806/Hanbang/BKBPPM tanggal 19 Desember 2017 dilakukan *auto debet* dari Rekening Peduli Gunung Agung ke rekening Bendahara Penanggulangan Bencana atas sisa saldo sebesar Rp770.299.925,90 pada tanggal 21 Desember 2017 serta setiap ada penerimaan sumbangan yang sampai tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp572.108.937,84.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.1.8 Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana	Rp1.342.644.673,84	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana per tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

- Sumbangan masyarakat untuk penanggulangan bencana erupsi Gunung Agung yang ditransfer dari Rekening Peduli Gunung Agung Karangasem	Rp	1.342.408.863,74
- Bunga Bank	Rp	235.810,10
- Jumlah	Rp	1.342.644.673,84

Kas tersebut ditampung dalam rekening dengan nomor rekening tabungan 022.02.02.44639-9 sesuai SK Bupati Karangasem Nomor 749/HK/2017 tentang Penetapan Rekening Bank Bendahara Penanggulangan Bencana pada Pemerintah Kabupaten Karangasem pada tanggal 21 Desember 2017.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.1.9 Piutang Pajak	Rp58.445.521.641,74	Rp51.445.499.827,65

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017 yang sudah diterbitkan ketetapan pajak namun belum terealisasi pembayarannya. Didalam piutang pajak tersebut terdapat piutang pajak PBB-P2 yang terjadi

permasalahan setelah pelimpahan dari Kantor Pajak Pratama Gianyar. Permasalahan tersebut antara lain:

- Terbit SPPT ganda dimana objek pajaknya satu tetapi ketetapannya terbit *double*, hal ini terjadi pada daerah-daerah yang terjadi pemekaran.
- Terbit SPPT untuk obyek yang dikategorikan sebagai fasilitas umum (FASUM) seperti untuk kepentingan pendidikan serta perkantoran.
- Terbit SPPT an. PEMILIK yang tidak jelas siapa wajib pajaknya dengan ketetapan jumlah pajak terhutang yang tidak pernah ada pembayaran sama sekali.
- Terbit SPPT yang ada nama wajib pajaknya namun oleh wajib pajak tidak mengakui memiliki objek pajak tersebut dalam hal ini khusus untuk daerah yang masih SISTEP (belum ada peta objek pajak).
- Masih munculnya konfirmasi piutang dari Wajib Pajak dalam SIM PBB-P2 dengan diterbitkannya informasi data pembayaran PBB-P2, namun Wajib Pajak menyatakan telah membayar dengan melakukan penyetoran pajak terutang dengan melampirkan bukti pembayaran.

Atas permasalahan tersebut beberapa tindakan penyelesaian yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem adalah:

- Pelaksanaan pembatalan SPPT terhadap SPPT ganda, SPPT FASUM, SPPT an. PEMILIK yang tidak jelas objek dan wajib pajaknya yang terus terbit setiap tahun dengan mengacu kepada Keputusan Bupati Karangasem Nomor 565/HK/2017 tentang Penetapan Mekanisme Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Karangasem.
- Penerbitan Surat Keterangan Lunas, dimana banyak piutang yang muncul walaupun telah dilakukan pembayaran oleh wajib pajak (ada bukti pembayarannya) sehingga diperlukan penerbitan Surat Keterangan Lunas melalui verifikasi berkas pembayaran berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 55 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2013.
- Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Karangasem.

Rincian piutang pajak dapat dilihat pada *lampiran 3*.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.1.10 Penyisihan Piutang Pajak	(Rp21.062.880.786,16)	(Rp16.924.984.803,22)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017 yang diperkirakan tak tertagih. Rincian perhitungan penyisihan piutang pajak dapat dilihat pada *lampiran 5*.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.1.11 Piutang Retribusi	Rp100.078.778,00	Rp809.957.726,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017, yang sudah diterbitkan ketetapannya namun belum terealisasi pembayarannya. Rincian piutang pajak dapat dilihat pada *lampiran 3*.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.1.12 Penyisihan Piutang Retribusi	(Rp10.977.658,31)	(Rp8.109.477,26)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Karangasem per tanggal 31 Desember 2017 yang diperkirakan tak tertagih. Rincian perhitungan penyisihan piutang retribusi dapat dilihat pada *lampiran 5*.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.1.13 Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi	Rp8.962.032.741,47	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi yang belum diterima Pemerintah Kabupaten Karangasem sampai dengan 31 Desember 2017, dengan perincian sebagai berikut:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp	4.131.401.589,08
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp	2.330.080.010,13
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rp	2.271.988.515,41
- Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (PPAP)	Rp	37.348.157,93
- Pajak Rokok	Rp	191.214.468,92
- Jumlah Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi	Rp	8.962.032.741,47

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.1.14 Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi	(Rp89.620.327,41)	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi per tanggal 31 Desember 2017. Rincian perhitungan penyisihan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi dapat dilihat pada *lampiran 5*.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.1.15 Piutang lainnya	Rp13.715.394.053,20	Rp32.854.852.419,15

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017. Rincian piutang lainnya dapat dilihat pada *lampiran 4*.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.1.16 Penyisihan Piutang lainnya	(Rp402.686.523,46)	(Rp585.858.311,43)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Karangasem per tanggal 31 Desember 2017. Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya dapat dilihat pada *lampiran 5*.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.1.17 Belanja Dibayar Dimuka	Rp23.720.833,33	Rp45.270.833,33

Jumlah tersebut merupakan saldo Belanja Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017. Rincian Belanja Dibayar Dimuka yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada *lampiran 6*.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.2 Investasi Jangka Panjang	Rp104.049.025.463,37	100.690.653.166,02
Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017, yang terdiri dari:		
- Investasi Non Permanen	Rp	0,00
- Investasi Permanen	Rp	104.049.025.463,37
- Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp	104.049.025.463,37

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.2.1 Investasi Non Permanen	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017 yang terdiri dari:		
- Dana Bergulir	Rp	290.219.129,08
- Penyisihan Dana Bergulir	Rp	(290.219.129,08)
- Investasi Dalam Proyek Pembangunan	Rp	11.432.236.519,00
- Penyisihan Investasi Dalam Proyek Pembangunan	Rp	(11.432.236.519,00)
- Jumlah Investasi Non Permanen	Rp	0,00

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.2.1.1 Investasi Dana Bergulir	Rp290.219.129,08	Rp341.700.106,08

Jumlah tersebut merupakan saldo dana bergulir per 31 Desember 2017 yang bersumber dari APBD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang disalurkan kepada kelompok usaha ekonomi produktif melalui dinas/instansi terkait, dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian.

Saldo Dana Bergulir merupakan Dana Bergulir yang terakhir kali diluncurkan pada Tahun 2009. Sejak Tahun 2010 Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang (UPK DB-UK INDAG) tidak lagi memberikan Bantuan Dana Bergulir kepada masyarakat dengan pertimbangan kondisi para pengguna dana bergulir terdahulu tidak mampu lagi mengangsur karena kesulitan likuiditas sehingga dana bergulir yang diberikan menjadi macet.

Berdasarkan rekomendasi Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang tertuang dalam LHP Nomor 700.04/31/ITPROV tanggal 26 Juli 2010, sisa kas dana bergulir yang ditampung dalam rekening PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Karangasem sejumlah Rp41.428.931,00 disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem tanggal 30 Desember 2010. Selanjutnya pengembalian tunggakan pada Tahun 2011 sebesar Rp18.457.000,00, Tahun 2012 sebesar Rp19.050.000,00, Tahun 2013 sebesar Rp8.122.222,00, Tahun 2014 sebesar Rp20.007.544,00, Tahun 2015 sebesar Rp11.800.000,00, Tahun 2016 sebesar Rp9.507.000,00 serta Tahun 2017 sebesar Rp51.480.977,00 langsung disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem dan diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

Sesuai surat Nomor B-420P.1.14/Dek.3/4/2011 tanggal 20 April 2011 perihal permintaan keterangan, Kejaksaan Negeri Amlapura telah melakukan pemeriksaan atas penyaluran Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan putusan yang dituangkan dalam surat putusan No. 171/Pid.Sus/2011/PN.Ap tanggal 11 Januari 2012 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012. Salah satu

hasil putusan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem dirugikan sebesar Rp120.350.000,00.

Pada tahun 2017 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem melaksanakan penyerahan penyelesaian piutang atas Investasi Dana Bergulir kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja pada tanggal 6 Maret 2017 dengan surat Nomor 181.3/656/Disperindag perihal penyerahan penyelesaian penghapusan piutang macet. Sejak diterima oleh KPKNL maka proses penagihan atas piutang dana bergulir dilaksanakan oleh pihak KPKNL dan sampai tanggal 31 Desember 2017 proses tersebut masih berlangsung dan belum diterbitkan rekomendasi penghapusan Dana Bergulir.

Atas saldo dari piutang tersebut telah dikurangi dengan penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih menurut *aging schedule* sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Karangasem.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.2.1.2 Penyisihan Investasi Dana Bergulir	(Rp290.219.129,08)	(Rp341.700.106,08)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Investasi Dana Bergulir di Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2017. Penyisihan tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014, dimana investasi non permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan dimana jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun disisihkan sebesar 100% dari nilai investasi.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.2.1.3 Investasi Dalam Proyek Pembangunan	Rp11.432.236.519,00	Rp11.432.236.519,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016 dalam Proyek Pembangunan Taman Ujung Karangasem sebesar Rp11.432.236.519,00 yang diukur dari Tahun 2009 dengan sisa umur investasi 21 tahun.

Pembangunan Taman Ujung Karangasem berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Karangasem dengan Puri Agung Karangasem melalui Akte Notaris Nomor 86 tanggal 30 Maret 2002. Jangka waktu perjanjian ditetapkan selama 30 tahun yang berakhir pada tanggal 11 Januari 2031. Semua bangunan yang dibangun/diperbaiki oleh Pemda Karangasem setelah berakhirnya perjanjian menjadi milik Puri Agung Karangasem. Sesuai dengan Keputusan Bersama Bupati Karangasem dan Puri Agung Karangasem No. 275 Tahun 2005 – No. 075 Tahun 2005, tanggal 4 Juli 2005 telah di tetapkan Dewan Pembina dan Badan Pengelola Obyek Wisata Taman Sukasada Ujung Kabupaten Karangasem.

Perjanjian Kerjasama pembagian hasil pengelolaan bersama diatur dalam akte notaris Nomor 22 tanggal 11 Januari 2001, dimana ketentuannya:

- Pemda Karangasem mendapat 60% dari keuntungan atau kerugian usaha bersama.
- Puri Agung Karangasem mendapat 40% dari keuntungan atau kerugian usaha bersama.

Pada Tahun 2017, pihak Pemda Karangasem telah memperoleh pembagian keuntungan sebesar Rp910.489.530,00. Seluruh pembagian keuntungan tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 22 Januari 2018.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.2.1.4 Penyisihan Investasi Dalam Proyek Pembangunan	(Rp11.432.236.519,00)	(Rp11.432.236.519,00)

Jumlah tersebut merupakan penyisihan atas investasi non permanen dalam proyek pembangunan Taman Sukasada Ujung per 31 Desember 2017 yang didasarkan pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem dimana penyisihan atas penurunan nilai investasi dengan menggunakan metode *aging schedule*.

Sifat perjanjian Investasi dalam proyek pembangunan Taman Sukasada Ujung antara pihak Pemda Karangasem dengan Puri Karangasem merupakan investasi non permanen dalam jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan maka pengkapitalisasian atas belanja untuk Badan Pengelola dihentikan, dan akumulasi nilai investasi dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2009, sejak Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya perjanjian disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan memperhitungkan penyisihan penurunan investasi.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.2.2 Investasi Permanen	Rp104.049.025.463,37	Rp100.690.653.166,02

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017 yang merupakan penyertaan modal pemerintah daerah di perusahaan/badan usaha milik daerah.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp104.049.025.463,37	Rp100.690.653.166,02

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017 pada:

- PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Rp	37.300.000.000,00
- PDAM Kabupaten Karangasem	Rp	66.174.025.463,37
- PT. Jamkrida Bali Mandara	Rp	575.000.000,00
- Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	104.049.025.463,37

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Rp37.300.000.000,00
---	----------------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali per 31 Desember 2017 yang disajikan berdasarkan metode biaya dikarenakan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT BPD Bali sebesar 2,14% dari keseluruhan modal PT BPD Bali. Penyertaan pada BPD Bali sebesar Rp37.300.000.000,00 merupakan setoran modal Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada BPD Bali yang sudah disahkan. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Karangasem melaksanakan penambahan penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan

Daerah Bali Tahun 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00. Nilai tersebut telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan tanggal 16 Mei 2017 yang dicatat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 47 tanggal 16 Mei 2017 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-26/KR.08/2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal Laporan Penambahan Modal Disetor.

Atas penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Karangasem memperoleh bagian keuntungan sebesar Rp10.916.020.925,18 atas deviden Tahun Buku 2016.

PDAM Kabupaten Karangasem

Rp66.174.025.463,37

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PDAM Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017 yang disajikan berdasarkan metode ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar 100% dari modal keseluruhan PDAM.

Pada Tahun 2017 terjadi penambahan Kekayaan Pemda yang dipisahkan sebesar Rp2.100.000.000,00 dari Rp55.900.547.648,68 pada Tahun 2016 menjadi Rp58.000.547.648,68 berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Tahun 2018 sebesar Rp2.100.000.000,00. Penambahan juga terjadi pada modal hibah sebesar Rp34.900.200,00. Laporan keuangan PDAM Tahun Buku 2017 diaudit oleh KAP K. GUNARSA dengan opini bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PDAM per 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut, sesuai dengan SAK ETAP.

Komposisi ekuitas pada laporan keuangan PDAM *audited* tersebut sebagai berikut:

- Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem	Rp58.000.547.648,68
- Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	Rp5.680.195.396,00
- Modal Hibah	Rp1.245.250.466,00
- Cadangan Dana Sosial dan Pendidikan	Rp2.906.499.794,69
- Cadangan Umum	Rp2.906.499.794,69
- Akumulasi kerugian PDAM s.d. Tahun Lalu	(Rp5.839.485.886,45)
- Laba/Rugi PDAM Tahun Berjalan (<i>Unaudited</i>)	Rp1.274.518.249,76
Nilai Investasi pada PDAM Karangasem	Rp66.174.025.463,37

Atas penyertaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2017 telah memperoleh pembagian keuntungan sebesar Rp603.142.550,98 yang ditransfer oleh PDAM Karangasem pada tanggal 29 Desember 2017 ke Rekening Kas Daerah. Pembagian keuntungan tersebut didasarkan pada Surat Bupati Karangasem Nomor 900/2310/EK/Setda tanggal 5 September 2017 serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1976 yaitu 30% untuk Dana Pembangunan Daerah dan 25% untuk Anggaran dan Belanja Daerah dari Laba bersih PDAM. Perhitungan pembagian keuntungan tersebut diperoleh dari nilai laba Tahun 2016 berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan Nomor 372/WR.01/KP/AD/VI/2017 tertanggal 6 Juni 2017 sebesar Rp1.096.622.819,97 dikalikan 55% sesuai dengan ketentuan diatas.

PT. Jamkrida Bali Mandara**Rp575.000.000,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT. Jamkrida Bali Mandara per 31 Desember 2017. Penyertaan ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penempatan Saham Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali serta penambahan penyertaan modal pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2017 sebesar Rp500.000.000,00.

PT. Jamkrida Bali Mandara didirikan dengan Akta Nomor 27 tanggal 21 November 2010 yang dibuat dihadapan I Made Pria Darsana, SH, M.Hum, Notaris di Badung dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-59685.A.H.01.01 Tahun 2010 tertanggal 22 Desember 2010 dan mendapat Ijin Operasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-720/KM.10/2010, tertanggal 30 Desember 2010 tentang Pemberian Ijin Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT. Jamkrida Bali Mandara.

Perusahaan ini memiliki kegiatan usaha dalam bidang jasa penjaminan pembiayaan yaitu memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, menengah dan koperasi, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah, meningkatkan sumber pendapatan usaha daerah dan jasa konsultasi manajemen. Pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Karangasem memperoleh deviden sebesar Rp457.568,00 yang diterima di Kasda pada tanggal 20 Maret 2017.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.3 Aset Tetap	Rp1.231.346.825.291,29	Rp1.157.723.672.956,24

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah	Rp	185.010.430.857,25
- Peralatan dan Mesin	Rp	380.532.215.997,07
- Gedung dan Bangunan	Rp	728.732.289.259,81
- Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	1.111.881.990.004,59
- Aset Tetap Lainnya	Rp	40.100.293.900,98
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	4.919.283.926,00
- Akumulasi Penyusutan	Rp	<u>(1.219.829.678.654,41)</u>
- Jumlah Aset Tetap	Rp	1.231.346.825.291,29

Pada Tahun 2017 telah dilakukan koreksi atas pencatatan Nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca atas:

1. Nilai aset tetap yang berada dibawah nilai kapitalisasi sesuai kebijakan akuntansi dikeluarkan dari daftar aset tetap OPD dan dipisahkan dalam buku *extracomptable*;
2. Nilai aset tetap yang diperoleh setelah pengeluaran awal/renovasi/perbaikan/*overhaul* yang dicatat secara terpisah sudah dilakukan kapitalisasi terhadap aset induknyasehingga terjadi koreksi nilai penyusutan atas penerapan kebijakan akuntansi untuk aset jenis ini;

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.3.1 Tanah	Rp185.010.430.857,25	Rp181.910.839.355,50

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017. Rincian mutasi Aset Tetap – Tanah Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	181.910.839.355,50
Mutasi Tambah:		
- Kapitalisasi	Rp	4.564.316.501,75
- Mutasi masuk antar OPD	Rp	10.089.019.080,00
Mutasi Kurang:		
- Koreksi Pencatatan	Rp	(1.365.000.000,00)
- Mutasi Keluar antar OPD	Rp	(10.089.019.080,00)
- Reklasifikasi ke aset lain-lain	Rp	(99.725.000,00)
Saldo Akhir	Rp	185.010.430.857,25

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah untuk masing-masing Unit Pengguna Barang dapat dilihat pada *lampiran 8*.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.3.2 Peralatan dan Mesin	Rp380.532.215.997,07	Rp339.793.223.647,87

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017. Rincian mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	339.793.223.647,87
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	Rp	47.643.769.912,00
- Reklasifikasi dari aset lainnya	Rp	87.020.500,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	593.198.692,00
- Penerimaan Hibah	Rp	4.135.599.450,00
- Kapitalisasi	Rp	25.592.000,00
- Mutasi Masuk antar OPD	Rp	25.575.284.055,00
- Koreksi pencatatan	Rp	459.925.115,04
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	(49.849.936,00)
- Reklasifikasi ke aset lainnya	Rp	(1.134.076.775,08)
- Koreksi Pencatatan	Rp	(2.938.085.020,00)
- Kebijakan <i>Extracomptable</i>	Rp	(8.084.101.588,76)
- Mutasi Keluar antar OPD	Rp	(25.575.284.055,00)
Saldo Akhir	Rp	380.532.215.997,07

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk tiap-tiap OPD dapat dilihat pada *lampiran 9*.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.3.3 Gedung dan Bangunan	Rp728.732.289.259,81	Rp653.990.016.583,23

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017. Rincian mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	653.990.016.583,23
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	Rp	60.248.410.581,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	11.034.146.094,00
- Reklasifikasi dari aset lainnya	Rp	5.028.365.142,19
- Penerimaan Hibah	Rp	12.642.232.943,29
- Kapitalisasi	Rp	1.771.084.474,00
- Mutasi Masuk antar OPD	Rp	71.309.416.139,66
- Koreksi pencatatan	Rp	116.956.485,00
Mutasi Kurang:		
- Penghapusan	Rp	(651.699.165,00)
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	(382.498.018,00)
- Reklasifikasi ke aset lainnya	Rp	(777.671.000,00)
- Koreksi Pencatatan	Rp	(13.043.847.790,00)
- Kebijakan <i>extracomptable</i>	Rp	(1.243.207.069,90)
- Mutasi Keluar antar OPD	Rp	(71.309.416.139,66)
Saldo Akhir	Rp	728.732.289.259,81

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan untuk tiap-tiap OPD dapat dilihat pada *lampiran 10*.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp1.111.881.990.004,59	Rp1.025.249.503.645,70

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017. Rincian mutasi Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	1.025.249.503.645,70
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	Rp	111.925.459.217,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	1.498.906.544,00
- Reklasifikasi dari aset lainnya	Rp	99.327.000,00
- Hibah	Rp	28.519.878.824,88
- Kapitalisasi	Rp	29.895.000,00
- Mutasi Masuk antar OPD	Rp	1.108.305.718,00
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	(412.911.000,00)
- Reklasifikasi ke aset lainnya	Rp	(28.936.573.601,99)
- Koreksi Pencatatan	Rp	(26.091.495.625,00)
- Mutasi Keluar antar OPD	Rp	(1.108.305.718,00)
Saldo Akhir	Rp	1.111.881.990.004,59

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk tiap-tiap OPD dapat dilihat pada *lampiran 11*.

6.1.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
	Rp40.100.293.900,98	Rp35.170.716.869,98
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:		
Saldo Awal	Rp	35.170.716.869,98
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	Rp	17.252.246.653,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	24.584.896,00
- Sumbangan Pihak Ketiga	Rp	30.000,00
- Hibah	Rp	98.923.200,00
- Mutasi Masuk antar OPD	Rp	365.055.000,00
- Koreksi pencatatan	Rp	480.000,00
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	(11.048.356.218,00)
- Reklasifikasi ke aset lainnya	Rp	(4.562.000,00)
- Koreksi Pencatatan	Rp	(1.393.769.500,00)
- Mutasi Keluar antar OPD	Rp	(365.055.000,00)
Saldo Akhir	Rp	40.100.293.900,98

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya untuk tiap-tiap OPD dapat dilihat pada *lampiran 12*.

6.1.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
	Rp4.919.283.926,00	Rp3.716.599.980,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017. Rincian mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:		
Saldo Awal	Rp	3.716.599.980,00
Mutasi Tambah:		
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	125.966.000,00
- Kapitalisasi	Rp	2.693.176.000,00
- Mutasi masuk antar OPD	Rp	223.336.000,00
Mutasi Kurang:		
- Mutasi keluar antar OPD	Rp	(223.336.000,00)
- Koreksi ke Persediaan	Rp	(9.935.000,00)
- Reklasifikasi ke aset lainnya	Rp	(223.336.000,00)
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	(1.383.187.054,00)
Saldo Akhir	Rp	4.919.283.926,00

Rincian mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk tiap-tiap OPD dapat dilihat pada *lampiran 13*.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	(Rp1.219.829.678.654,41)	(Rp1.082.107.227.126,04)

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan atas Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017. Akumulasi Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus tanpa mempertimbangkan nilai residu.

Untuk Tahun 2017, terdapat penyesuaian nilai penyusutan dilakukan dengan berlakunya Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem ditetapkan tanggal 3 Mei 2016 karena diterapkannya kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan awal aset serta atas aset yang mempunyai nilai dibawah batas kapitalisasi dicatat dalam daftar yang berbeda. Sehingga dalam penambahan dan pengurangan akumulasi penyusutan terdiri dari penyesuaian nilai akumulasi penyusutan untuk perubahan kebijakan sebagaimana telah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada bagian Laporan Perubahan Ekuitas (5.2). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	1.082.107.227.126,04
Mutasi Tambah:		
- Beban Penyusutan	Rp	133.370.223.157,38
- Reklasifikasi dari aset tetap	Rp	84.205.000,00
- Reklasifikasi dari aset lain-lain	Rp	5.156.256.922,19
- Penerimaan Hibah	Rp	16.354.789.069,92
- Kapitalisasi	Rp	725.529.367,36
- Koreksi Pencatatan	Rp	24.978.192.175,22
- Mutasi Masuk antar OPD	Rp	31.069.486.656,38
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	(9.989.000,00)
- Reklasifikasi ke aset lain - lain	Rp	(27.209.541.732,06)
- Penghapusan	Rp	(535.148.785,00)
- Koreksi Pencatatan	Rp	(8.958.372.301,07)
- Kebijakan <i>extracomptable</i>	Rp	(6.272.092.345,57)
- Mutasi Keluar antar OPD	Rp	(31.031.086.656,38)
Saldo Akhir	Rp	1.219.829.678.654,41

Rincian mutasi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya untuk tiap-tiap OPD dapat dilihat pada *lampiran 14*.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.4 Dana Cadangan	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Cadangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.5 Aset Lainnya	Rp12.298.290.002,15	Rp9.104.595.496,97

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017 yang terdiri dari:

- Tagihan Penjualan Angsuran	Rp	0,00
------------------------------	----	------

- Tuntutan Ganti Rugi	Rp	0,00
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	0,00
- Aset Tidak Berwujud	Rp	0,00
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	0,00
- Aset Lain-Lain	Rp	12.298.290.002,15
- Jumlah Aset Lainnya	Rp	12.298.290.002,15

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo tagihan penjualan secara angsuran atas sepeda motor kepada dua orang Kepala Desa pada Tahun 2002 sebesar Rp1.120.000,00. Telah dilakukan upaya penagihan lebih dari tiga kali, namun sampai tanggal neraca (31 Desember 2017) belum dilakukan pelunasan oleh yang bersangkutan. Atas tagihan tersebut telah dilakukan penyisihan piutang sebesar 100%, sehingga nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp0,00 (Rp1.120.000,00 - Rp1.120.000,00).

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.5.2 Tuntutan Ganti Rugi	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Tuntutan Ganti Rugi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017. Nilai Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi tersebut, berasal dari nilai temuan audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2009 dan 2013 yang sudah ditetapkan dalam SK Penetapan/ Pembebanan Kerugian Daerah sebesar Rp103.612.800,00 dan telah disisihkan sebesar Rp(103.612.800,00).

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.5.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.5.4 Aset Tidak Berwujud	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.5.5 Amortisasi Aset Tidak Berwujud		Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.1.5.6 Aset Lain-Lain	Rp12.298.290.002,15	Rp9.104.595.496,97

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017, yang terdiri dari:

- Piutang Pajak yang Akan Dihapuskan	Rp	0,00
- Tagihan Tunggakan Taman Wisata Putung	Rp	0,00
- Ternak Guliran dan Tanaman	Rp	2.015.034.366,00
- Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Operasional/Akan Dihilangkan/Disertakan	Rp	4.702.686.643,31
- Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat	Rp	4.643.690.126,16
- Aset Tetap akan dihapuskan selain Rusak Berat	Rp	695.234.666,67
- Aset Gedung dan Bangunan yang belum dikapitalisasi	Rp	241.644.200,00
- Jumlah Aset Lainnya	Rp	<u>12.298.290.002,15</u>

Piutang Pajak yang Akan Dihapuskan Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang pajak yang direncanakan akan dihapuskan per 31 Desember 2017 sesuai dengan surat usulan penghapusan piutang pajak nomor 973/803.a/Dispenda tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp940.631.736,44. Telah dilakukan upaya penagihan lebih dari tiga kali, namun sampai tanggal neraca (31 Desember 2017) belum dilakukan pelunasan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Atas tagihan tersebut telah dilakukan penyisihan piutang sebesar 100%, sehingga nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp0,00 (Rp940.631.736,44 - Rp940.631.736,44). Rincian Piutang Pajak yang akan Dihapuskan dapat dilihat pada *lampiran 15*.

Tagihan Tunggakan Taman Wisata Putung Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo tagihan atas tunggakan pembayaran sewa Taman Wisata Putung oleh PT. Panca Bahagia Rahayu sebesar Rp13.040.000,00. Telah dilakukan upaya penagihan lebih dari tiga kali, namun sampai tanggal neraca (31 Desember 2017) belum dilakukan pelunasan oleh yang bersangkutan. Atas tagihan tersebut telah dilakukan penyisihan piutang sebesar 100%, sehingga nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp0,00 (Rp13.040.000,00 - Rp13.040.000,00)

Taman Wisata Putung dikelola oleh pihak ke III (PT Panca Bahagia Rahayu) sesuai surat perjanjian Sewa Menyewa Nomor 024/21/Umum Tanggal 16 Mei 1998 untuk jangka waktu 25 Tahun (30 April 1986 s.d. 1 Mei 2011) dengan nilai sewa per tahun Rp3.260.000,00. Namun dalam pelaksanaannya pihak III (PT Panca Bahagia Rahayu) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga terdapat tunggakan sewa selama 4 tahun (2001 s.d. 2004), karena adanya pemutusan kontrak kerja sama dengan PT Panca Bahagia Rahayu sampai dengan saat penyusunan Laporan Keuangan ini belum ada penyelesaian tentang tunggakan sewa tersebut diatas.

Ternak Guliran dan Tanaman Rp2.015.034.366,00

Jumlah tersebut merupakan saldo ternak guliran sebesar Rp1.992.165.366,00 dan Tanaman perkebunan lain-lain pada Dinas Pertanian sebesar Rp22.869.000,00.

Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Operasional/Akan Dihilangkan/Disertakan Rp4.702.686.643,31

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan akan dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada pihak

Pihak Ketiga per 31 Desember 2017. Nilai tersebut diatas disajikan berdasarkan nilai buku aset tetap, dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga				
Peralatan dan Mesin	1.441.764.255,00	1.409.434.249,00	32.330.006,00	Sekolah Swasta
	50.000.000,00	-	50.000.000,00	Rusak berat Sekolah Swasta
	119.903.000,00	119.903.000,00	-	Aset SMA/SMK belum validasi
Gedung dan Bangunan	1.932.130.384,00	660.943.183,36	1.271.187.200,64	Sekolah Swasta
	415.543.000,00	23.212.800,00	392.330.200,00	Rusak berat Sekolah Swasta
	357.326.000,00	91.638.080,00	265.687.920,00	Aset SMA/SMK belum validasi
Aset Tetap Lainnya	117.550.000,00	117.550.000,00	-	Sekolah Swasta
Dinas Perikanan				
Gedung dan Bangunan	212.500.000,00	42.500.000,00	170.000.000,00	Belum ada BAST
Dinas PUPR				
Jalan Irigasi dan Jaringan	4.215.321.000,00	1.900.668.500,00	2.314.652.500,00	Akan diserahkan ke Desa
	24.216.792.751,99	24.010.293.935,32	206.498.816,67	Akan diserahkan ke Provinsi
Jumlah	33.078.830.390,99	28.376.143.747,68	4.702.686.643,31	

Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat

Rp4.643.690.126,16

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan operasional pemerintahan per 31 Desember 2017. Rincian Aset Tetap dalam kondisi rusak berat per OPD dapat dilihat pada *lampiran 16*.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.2 Kewajiban	Rp22.769.968.859,64	Rp73.280.557.672,04

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017 yang terdiri dari:

- Kewajiban Jangka Pendek	Rp	22.573.659.482,99
- Kewajiban Jangka Panjang	Rp	196.309.376,65
- Jumlah Kewajiban	Rp	22.769.968.859,64

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	Rp22.573.659.482,99	Rp72.953.375.377,75

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017 yang terdiri dari:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga	Rp	0,00
- Utang Bunga	Rp	0,00
- Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	Rp	130.872.917,64
- Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	64.760.833,33

- Utang Belanja	Rp	22.378.025.732,02
- Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp	22.573.659.482,99

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	Rp0,00
		Rp6.212.500,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.2.1.2	Utang Bunga	Rp0,00
		Rp647.662.353,01

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Bunga Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.2.1.3	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	Rp130.872.917,64
		Rp19.171.070.518,64

Jumlah tersebut merupakan saldo Bagian Lancar Utang Dalam Negeri atas Utang kepada Pemerintah Pusat yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017. Utang tersebut yang jatuh tempo dan harus dilunasi pada Tahun 2018 yaitu tanggal (5 April dan 5 Oktober 2018) sesuai Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1134/DP3/2000 tanggal 5 April 2000.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	Rp64.760.833,33
		Rp38.047.708,33

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Pendapatan yang mempunyai masa manfaat s.d. 2017	Rp	177.625.000,00
- Pendapatan yang telah diakui sebelum Tahun 2017	Rp	60.777.291,67
- Diakui sebagai pendapatan Tahun 2017	Rp	52.086.875,00
Sisa yang masih belum diakui sebagai pendapatan	Rp	64.760.833,33

Rincian Pendapatan diterima dimuka tersebut dapat dilihat pada *lampiran 17*.

	<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.2.1.5	Utang Belanja	Rp22.378.025.732,02
		Rp53.090.382.297,77

Jumlah ini merupakan saldo Utang Belanja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem per tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Nilai
A	Utang Belanja Pegawai		
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Kekurangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan Oktober s.d Desember 2015	Rp15.211.800,00
		Tambahan Penghasilan Guru Sertifikasi	Rp7.204.351.100,00

No	Uraian		Nilai
		Jumlah	Rp7.219.562.900,00
2	Dinas Kesehatan	Insentif Pemungutan retribusi berupa Jaspel Pusk. Se-Kab. Karangasem bulan Desember 2017	Rp168.000.020,00
		Insentif Jasa Pelayanan Puskesmas se-Kab. Karangasem	Rp2.765.873.559,50
		Jumlah	Rp2.933.873.579,50
3	RSUD Kabupaten Karangasem	Jasa Pelayanan (Umum, JKN + susulan, Farmasi, JKN Naik Kelas, Diklat, BPJS Tenaga Kerja, Jasa Raharja, Ambulance rujukan dan DSP) 2017	Rp5.935.342.254,27
		Kekurangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp63.500.694,00
		Jumlah	Rp5.998.842.948,27
4	Dinas Ketenagakerjaan	Kekurangan Gaji pengangkatan dari CPNS ke PNS	Rp7.611.900,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Insentif Tri Wulan IV tahun 2017	Rp1.990.249.805,00
		Tunggakan iuran BPJS hasil rekonsiliasi	Rp2.544.135,00
		Kekurangan pembayaran JKM bulan Juli s.d Desember 2017	Rp596.511.868,00
		Jumlah	Rp2.589.305.808,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	Kekurangan gaji tahun 2017	Rp459.800,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Insentif Pemungutan Retribusi	Rp79.250.000,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran	Kekurangan gaji Kenaikan Pangkat	Rp859.500,00
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Insentif Tri Wulan III dan IV Tahun 2017	Rp66.376.443,25
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kekurangan Gaji Naik Pangkat	Rp719.200,00
		Kekurangan Tunjangan Jabatan	Rp2.520.000,00
			Rp3.239.200,00
11	Kecamatan Selat	Kekurangan gaji Kenaikan Pangkat	Rp2.289.100,00
Total Utang Belanja Pegawai			Rp18.901.670.999,02
B	Utang Belanja Persediaan		
1	RSUD Kabupaten Karangasem	Darah Siap Transfusi (PMI)	Rp313.920.000,00
		BBM Rujukan	Rp7.513.550,00
		Bahan Habis Pakai (BHP)	Rp1.880.293.976,00
		Obat-obatan	Rp274.066.002,00
		Bahan Kimia/Lab	Rp156.187.372,00

No	Uraian		Nilai
		Gas Medis	Rp419.383.100,00
		Barang Cetak	Rp20.510.000,00
		ATK (IT)	Rp885.500,00
Total Utang Belanja Persediaan			Rp3.072.759.500,00
C	Utang Belanja Jasa		
1	RSUD Kabupaten Karangasem	Belanja Rujukan Parsial (Lab Penunjang)	Rp25.679.500,00
		Sampah Medis	Rp205.656.656,00
		Jumlah	Rp231.336.156,00
2	Dinas Kesehatan	Belanja Listrik Puskesmas bulan Desember 2017	Rp23.941.416,00
3	Dinas Pemadam Kebakaran	Belanja Telepon	Rp1.682.913,00
4	Dinas Perhubungan	Upah Pungut Retribusi Parkir Bagi Petugas Pungut Non PNS Tahun 2017	Rp4.774.600,00
5	Dinas Pertanian	Upah Pungut Retribusi Rumah Potong	Rp600.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tagihan Penggunaan Air PDAM bagi pengungsi	Rp121.642.000,00
7	Bagian Umum Setda Kabupaten Karangasem	Belanja Telepon	Rp4.059.748,00
		Belanja Air	Rp7.302.500,00
Total Utang Belanja Jasa			Rp395.339.333,00
D	Utang Belanja Modal		
1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor/Bangunan Gedung Kantor lain-lain	Rp8.255.900,00
Total Utang Belanja Modal			Rp8.255.900,00
Jumlah Keseluruhan			Rp22.378.025.732,02

Utang Belanja diatas akan direalisasikan pembayarannya dalam kegiatan masing-masing OPD Tahun Anggaran 2018.

Pemerintah Kabupaten Karangasem per tanggal 31 Desember 2017, masih menguasai uang jaminan reklamasi yang diberikan oleh para Penambang Galian C yang beroperasi di Kabupaten Karangasem sebesar Rp1.205.799.000,00. Uang tersebut ditempatkan dalam bentuk bilyet deposito yang dapat dicairkan ketika para penambang tersebut telah memenuhi kewajibannya dalam mereklamasi daerah tambangnya. Rincian dana jaminan reklamasi tersebut dapat dilihat pada *lampiran 18*.

		<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	Rp196.309.376,65	Rp327.182.294,29

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka panjang Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017 yang merupakan utang dalam negeri dari pemerintah pusat yang telah diterima.

		<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.2.2.1	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	Rp196.309.376,65	Rp327.182.294,29

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017 sebesar Rp196.309.376,65 yang berasal dari Perjanjian Pinjaman No. SLA-1134/DP3/2000, tanggal 5 April 2000 dari pinjaman kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman untuk membiayai pembangunan Terminal Karang Sokong, dengan uraian sebagai berikut:

- Plafond Pinjaman : Rp2.260.000.000,00
- Jumlah Penarikan : Rp2.224.839.000,00
- Jangka Waktu pinjaman : 20 tahun – masa tenggang 3 tahun
- Bunga : 11,75% per tahun
- Biaya Komitmen : 0,75% per tahun dihitung 30 hari sejak perjanjian ditanda tangani (5 April 2000)
- Jatuh Tempo Angsuran : 5 April dan 5 Oktober (5-10-2003 s.d. 5-04-2020)
- Pokok Angsuran : Rp65.436.458,82 (selama 34 kali angsuran)
- Denda : 2% / tahun, setiap terjadi kelambatan pembayaran
- Closing date : 31 Desember 2020

Dari pokok pinjaman tersebut, sampai dengan 31 Desember 2016 telah dilaksanakan pelunasan sebesar Rp1.897.657.305,78 sehingga saldo pokok utang yang masih harus dibayar sebesar Rp196.309.376,65 setelah dipindahkan ke Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat sebesar Rp130.872.917,64 untuk rencana pembayaran di Tahun 2018.

		<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
6.1.3	Ekuitas	Rp1.520.292.462.016,06	Rp1.398.745.977.135,29

Jumlah tersebut merupakan saldo ekuitas milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017. Rincian perhitungan nilai ekuitas dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan bagian penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (6.2.4).

6.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas

6.2.1 Ekuitas Awal **Rp1.398.745.977.135,29**

Jumlah tersebut merupakan ekuitas awal Tahun 2017 sebesar Rp1.398.745.977.135,29 yang merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2016 setelah audit BPK RI.

6.2.2 Surplus/(Defisit) – LO **Rp131.748.622.655,32**

Jumlah tersebut merupakan surplus Laporan Operasional Tahun 2017 sebesar Rp131.748.622.655,32. Surplus laporan operasional terjadi disebabkan transaksi-transaksi yang terjadi pada Tahun 2017 baik yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas.

6.2.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar **Rp(10.202.137.774,55)**

Jumlah tersebut merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Tahun 2017 yang terdiri dari:

6.2.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan **Rp(2.739.383.026,94)**

Jumlah tersebut merupakan dampak kumulatif atas adanya perubahan penerapan kebijakan akuntansi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual terhadap akun-akun yang terdapat di Neraca, dengan uraian sebagai berikut:

Koreksi peralatan dan mesin <i>extracomptable</i>	Rp	(2.842.394.343,34)
Koreksi gedung dan bangunan <i>extracomptable</i>	Rp	(1.104.035.900,00)
Koreksi akumulasi penyusutan <i>extracomptable</i>	Rp	1.207.047.216,40
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp	(2.739.383.026,94)

Pada Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Karangasem telah melakukan perubahan atas kebijakan akuntansi berbasis akrual yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk penyempurnaan pada kebijakan akuntansi beberapa akun. Hal tersebut mempunyai dampak kebijakan terhadap ekuitas yang telah disajikan sebelumnya dalam laporan keuangan Tahun 2016, perubahan kebijakan tersebut yaitu:

- 1) Penerapan kebijakan kapitalisasi aset tetap kategori peralatan dan mesin untuk nilai dibawah Rp500.000,00 dikecualikan untuk *meubelair* dibawah Rp300.000,00 yang sebelumnya masih tercatat dalam daftar aset tetap OPD.
- 2) Penerapan kebijakan kapitalisasi aset tetap kategori gedung dan bangunan dengan tahun perolehan mulai dari Tahun 2010 untuk nilai dibawah Rp50.000.000,00 yang sebelumnya masih tercatat dalam daftar aset tetap OPD.
- 3) Penerapan kebijakan pengeluaran setelah perolehan (*subsequent Expenditures*) untuk aset tetap gedung dan bangunan dengan nilai 15% keatas dari nilai perolehan mulai Tahun 2010.
- 4) Penerapan kebijakan atas aset tetap berupa aset tetap lainnya tidak disusutkan yang sebelumnya dilakukan penyusutan atas aset tetap tersebut.

6.2.3.2 Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar Rp(7.462.754.747,61)

Jumlah tersebut merupakan dampak kumulatif atas terjadinya kesalahan pencatatan pada periode sebelumnya dan dilakukan koreksi pencatatan pada tahun pelaporan, dengan uraian sebagai berikut:

Koreksi saldo awal kas di bendahara BOS	Rp	(2.831.635,46)
Koreksi saldo awal piutang PBB-P2	Rp	3.487.964,00
Koreksi saldo awal piutang retribusi telekomunikasi	Rp	(2.862.589,00)
Koreksi piutang lainnya	Rp	55.122.687,32
Koreksi penyisihan piutang pajak	Rp	26.179.550,84
Koreksi penyisihan piutang retribusi kesehatan	Rp	5.132.950,00
Koreksi penyisihan piutang bagi hasil pajak provinsi	Rp	89.620.327,41
Koreksi penyisihan piutang lainnya	Rp	101.168.163,92
Koreksi saldo awal persediaan	Rp	(16.847.000,00)
Pengembalian dana bergulir Disperindag	Rp	51.480.977,00
Koreksi Tanah	Rp	3.199.316.501,75
Koreksi peralatan dan mesin	Rp	1.513.375.339,89
Reklasifikasi dan koreksi gedung dan bangunan	Rp	5.808.634.790,52
Reklasifikasi dan koreksi Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	(46.145.211.944,48)
Reklasifikasi dan koreksi aset tetap lainnya	Rp	(11.827.603.322,00)
Reklasifikasi dan koreksi konstruksi dalam pengerjaan	Rp	(1.048.520.054,00)
Reklasifikasi dan koreksi akumulasi penyusutan	Rp	3.269.423.201,30
Koreksi aset lain-lain	Rp	(301.448.466,00)
Pembayaran bagian lancar utang jangka panjang TA 2016	Rp	33.329.558.931,46
Pembayaran utang bunga TA 2016	Rp	647.662.353,01
Lain-lain PAD yang sah RSUD Tahun 2016 belum diakui	Rp	(24.000.000,00)
Koreksi Pendapatan Hibah Aset	Rp	3.806.406.524,91
Jumlah Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	Rp	(7.462.754.747,61)

6.2.4 Ekuitas Akhir Rp1.520.292.462.016,06

Jumlah tersebut merupakan saldo ekuitas akhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Tahun 2017 atas kegiatan operasionalnya. Nilai ekuitas akhir ini sama dengan nilai ekuitas yang terdapat di neraca per 31 Desember 2017 (6.1.3).

6.3 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran

6.3.1 Pendapatan Daerah Rp1.525.935.905.692,07

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun Anggaran (TA) 2017, yang terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah	Rp	198.663.672.239,22
- Pendapatan Transfer	Rp	1.266.307.329.391,72
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp	60.964.904.061,13
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp	1.525.935.905.692,07

6.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah Rp198.663.672.239,22

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun Anggaran (TA) 2017, yang terdiri dari:

- Pendapatan Pajak Daerah	Rp	96.850.262.306,72
- Pendapatan Retribusi Daerah	Rp	12.590.471.840,26
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	11.519.621.044,16
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	77.703.317.048,08
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	198.663.672.239,22

6.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Rp96.850.262.306,72

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017. Realisasi tersebut melebihi anggaran sebesar Rp13.463.891.306,72 atau 116,15%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Pajak Hotel	19.394.646.000,00	22.694.800.655,25	3.300.154.655,25	117,02
2	Pajak Restoran	8.772.248.000,00	10.537.922.303,47	1.765.674.303,47	120,13
3	Pajak Hiburan	54.000.000,00	59.693.158,00	5.693.158,00	110,54
4	Pajak Reklame	437.213.000,00	557.196.900,00	119.983.900,00	127,44
5	Pajak Penerangan Jalan	11.050.000.000,00	12.611.652.305,00	1.561.652.305,00	114,13
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.626.264.000,00	29.204.693.429,01	3.578.429.429,01	113,96
7	Pajak Parkir	79.000.000,00	87.606.300,00	8.606.300,00	110,89
8	Pajak Air Tanah	973.000.000,00	1.089.375.319,24	116.375.319,24	111,96
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.000.000.000,00	6.481.574.999,00	481.574.999,00	108,03
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan	11.000.000.000,00	13.525.746.937,75	2.525.746.937,75	122,96
Jumlah		83.386.371.000,00	96.850.262.306,72	13.463.891.306,72	116,15

Penerimaan Pajak Daerah lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan disebabkan karena:

1. Realisasi Pajak Hotel melebihi target disebabkan karena adanya pelunasan pajak pada tahun sebelumnya dan tertibnya wajib pajak melunasi kewajibannya disamping diterapkan metode pembayaran pajak dengan sistem online;
2. Realisasi Pajak Restoran melebihi target yang ditetapkan disebabkan jumlah Wajib Pajak yang meningkat karena adanya Restoran/Rumah Makan baru;
3. Realisasi Pajak Hiburan melebihi target yang ditetapkan disebabkan karena adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat pagelaran massal seperti kegiatan 17 Agustus-an, kegiatan konser-konser musik dan adanya Spa baru;

4. Realisasi Pajak Reklame melebihi target yang ditetapkan disebabkan banyaknya penggunaan reklame/iklan-iklan oleh Wajib Pajak;
5. Realisasi Pajak Penerangan Jalan melebihi target yang ditetapkan disebabkan meningkatnya konsumsi listrik untuk industri dan masyarakat pada Wajib Pajak PLN disamping adanya penambahan untuk konsumen baru dan kenaikan tarif dasar listrik;
6. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan melebihi target yang ditetapkan karena adanya pembayaran angsuran piutang pajak pada tahun sebelumnya;
7. Realisasi Pajak Parkir melebihi target yang ditetapkan disebabkan jumlah Wajib Pajak yang meningkat karena adanya tempat parkir yang sifatnya pribadi baru mendaftar sebagai Wajib Pajak;
8. Realisasi Pajak Air Tanah melampaui target karena adanya pelunasan pajak pada tahun sebelumnya dan peningkatan Wajib Pajak air tanah yang baru;
9. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melebihi target yang ditetapkan disebabkan karena Pajak Bumi dan Bangunan sudah dikelola langsung oleh BPKAD dan sudah menggunakan aplikasi sehingga data pajak bumi dan bangunan yang diperoleh lebih akurat; dan
10. Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan melebihi target yang ditetapkan disebabkan terjadi transaksi jual beli dengan nilai yang besar seperti penjualan Hardys Grosir serta dengan adanya program tax amnesty menyebabkan banyak wajib pajak yang melakukan proses pengalihan hak atas tanahnya.

6.3.1.1.2

Pendapatan Retribusi Daerah

Rp12.590.471.840,26

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017. Realisasi tersebut melebihi anggaran sebesar Rp2.096.202.071,54 atau 119,97%, dengan rincian penerimaan retribusi sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
I.	Retribusi Jasa Umum	6.424.470.000,00	7.661.873.906,00	1.237.403.906,00	119,26
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.500.000.000,00	2.869.382.900,00	358.534.400,00	114,78
2	Retribusi Pelayanan Persampahan & Kebersihan	340.000.000,00	334.481.000,00	(5.519.000,00)	98,38
3	Retribusi Parkir Ditepi Jalan umum	157.425.000,00	157.037.000,00	(388.000,00)	99,75
4	Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran	530.919.000,00	588.832.000,00	57.913.000,00	110,91
5	Retribusi Pelayanan Pasar – Los	928.483.000,00	1.376.111.000,00	447.628.000,00	148,21
6	Retribusi Pelayanan Pasar – Kios	1.107.643.000,00	1.062.111.000,00	(45.532.000,00)	95,89
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	280.000.000,00	386.012.000,00	106.012.000,00	137,86
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	33.220.000,00	3.220.000,00	110,73
9	Retribusi Pengendalian Menara & Telekomunikasi	550.000.000,00	854.687.006,00	304.687.006,00	155,40
II.	Retribusi Jasa Usaha	2.046.742.503,00	2.685.887.500,00	639.144.997,00	131,23
1	<i>Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah & Bangunan</i>	<i>152.050.000,00</i>	<i>204.814.000,00</i>	<i>52.764.000,00</i>	<i>134,70</i>
	a. Sewa tanah dan bangunan diparda	7.860.000,00	15.638.000,00	7.778.000,00	198,96

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
	b. Sewa Tanah Disperindag	60.000.000,00	94.576.000,00	34.576.000,00	157,63
	c. Sewa Kantin dan Sewa Tempat ATM	84.190.000,00	94.600.000,00	10.410.000,00	112,36
2	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah – Ruangan	3.800.000,00	1.650.000,00	(2.150.000,00)	43,42
3	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor/ Alat Berat	55.000.000,00	56.400.000,00	1.400.000,00	102,55
4	Retribusi Terminal	155.625.000,00	143.164.000,00	(12.461.000,00)	91,99
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	232.500.000,00	213.948.000,00	(18.552.000,00)	92,02
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	32.000.000,00	32.996.500,00	996.500,00	103,11
7	Retribusi Tempat Rekreasi olah raga	1.403.767.503,00	2.020.915.000,00	617.147.497,00	143,96
	a. Ret. Tempat Rekreasi Olahraga Diparda	1.399.567.503,00	2.020.415.000,00	620.847.497,00	144,36
	b. Ret. Tempat Olahraga Disdikpora	4.200.000,00	500.000,00	(3.700.000,00)	11,90
8	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
III.	Retribusi Perijinan Tertentu	2.023.057.265,72	2.242.710.434,26	219.653.168,54	110,86
1	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	1.500.000.000,00	1.577.500.000,00	77.500.000,00	105,17
2	Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	50.000.000,00	69.000.000,00	19.000.000,00	138,00
3	Retribusi Ijin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	17.057.265,72	16.885.034,26	(172.231,46)	98,99
4	Retribusi Pemberian Ijin Trayek kepada Orang Pribadi	6.000.000,00	4.925.000,00	(1.075.000,00)	82,08
5.	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	450.000.000,00	574.400.400,00	124.400.400,00	127,64
	Jumlah	10.494.269.768,72	12.590.471.840,26	2.085.353.571,54	119,87

Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp12.590.471.840,26 atau 119,97% dibandingkan anggarannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2017 sebesar Rp7.661.873.906,00 dibandingkan anggarannya sebesar Rp6.424.470.000,00 menunjukkan realisasi diatas anggaran sebesar Rp1.237.403.906,00 atau 119,26% yang utamanya disebabkan:

- Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan lebih tinggi dari yang dianggarkan disebabkan oleh banyaknya jumlah kunjungan pasien di puskesmas;
- Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan yang diuji;
- Penerimaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan karena masyarakat banyak menggunakan jasa penyedotan kakus; dan

- d. Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan.
2. Retribusi Jasa Usaha
 Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2017 sebesar Rp2.685.887.500,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.046.742.503,00 menunjukkan realisasi diatas anggaran sebesar Rp639.144.997,00 atau 131,23% yang utamanya disebabkan:
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasinya lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan yang disebabkan retribusi sewa alat berat Dinas PU, retribusi sewa tanah dan bangunan lebih tinggi dari yang ditetapkan karena masyarakat yang membutuhkan jasa tersebut pada Tahun 2017 meningkat serta adanya realisasi sewa kantin dan sewa tempat ATM pada Bagian Perlengkapan;
 - Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan realisasinya lebih tinggi dari yang dianggarkan; dan
 - Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasinya lebih tinggi dari yang dianggarkan disebabkan meningkatnya pengunjung yang datang ke tempat rekreasi dan olahraga.
3. Retribusi Perijinan Tertentu
 Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.242.710.434,26 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.023.057.265,72 menunjukkan realisasi diatas anggaran sebesar Rp219.653.168,54 atau 110,86% yang utama disebabkan:
- Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) melebihi anggaran yang ditetapkan disebabkan meningkatnya jumlah ijin untuk mendirikan bangunan dari masyarakat;
 - Penerimaan Retribusi Ijin Gangguan lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan;
 - Penerimaan retribusi izin tempat penjualan minuman Beralkohol realisasinya lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan;
 - Pendapatan Retribusi Ijin Trayek lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan; dan
 - Retribusi perijinan mempekerjakan tenaga kerja asing lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan.

6.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp11.519.621.044,16

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017. Realisasi pendapatan dari TA 2017 sebesar Rp11.519.621.044,16 telah melebihi target dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp68.755.513,91 atau 100,60% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem	534.387.037,07	603.142.550,98	68.755.513,91	112,87
2	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	10.916.020.925,18	10.916.020.925,18	0,00	100,00
3	PT Jamkrida Bali Mandara	457.568,00	457.568,00	0,00	100,00
Jumlah		11.450.865.530,25	11.519.621.044,16	68.755.513,91	100,60

6.3.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp77.703.317.048,08

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017. Realisasi Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah selama TA 2017 adalah sebesar Rp77.703.317.048,08 dibandingkan anggarannya sebesar Rp74.870.632.530,12 menunjukkan realisasi diatas anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.755.424.027,96 atau 103,78% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	31.992.400,00	24.336.800,00	7.655.600,00	76,07
2	Jasa Giro	3.813.000.000,00	4.998.854.307,58	1.185.854.307,58	131,10
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	12.169.700,00	12.169.700,00	0,00
4	Komisi atas Pengelolaan Tanah Aset Pemprov Bali	10.000.000,00	4.768.000,00	(5.232.000,00)	47,68
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	87.970.387,03	87.970.387,03	0,00
6	Pendapatan Denda Pajak	394.241.492,66	859.233.840,55	464.992.347,89	217,95
7	Pendapatan Denda Retribusi	172.231,46	5.879.684,46	5.707.453,00	3.413,83
8	Pendapatan dari Pengembalian	583.620.109,00	616.178.909,00	32.558.800,00	105,58
9	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
10	Pendapatan dari BLUD	52.500.000.000,00	53.988.474.422,46	1.488.474.422,46	102,84
11	Pendapatan Hasil Pengelolaan Investasi Non Permanen	805.958.297,00	771.863.297,00	(34.095.000,00)	95,77
12	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
13	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP	16.731.648.000,00	16.252.337.700,00	(479.310.300,00)	97,13
Jumlah		74.870.632.530,12	77.703.317.048,08	2.832.684.517,96	103,78

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan disebabkan karena:

1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan disebabkan adanya realisasi dari Penjualan Aset daerah;
2. Meningkatnya penerimaan Jasa Giro karena meningkatnya PAD dan kebijakan *autodebet* masing-masing rekening Giro OPD;
3. Tindak Lanjut Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang semakin tinggi;
4. Penerimaan Komisi atas pengelolaan tanah aset Pemerintah Provinsi Bali lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan;
5. Adanya penerimaan pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
6. Kesadaran Wajib Pajak meningkat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran pajak;
7. Adanya penerimaan pendapatan denda retribusi;
8. Pendapatan BLUD lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan;
9. Adanya pendapatan denda atas pelanggaran perda; dan
10. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama realisasinya lebih rendah dari yang dianggarkan.

6.3.1.2 Pendapatan Transfer Rp1.266.307.329.391,72

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017, yang terdiri dari:

- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	Rp	949.134.029.659,00
- Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	Rp	71.182.742.000,00
- Transfer Pemerintah Provinsi	Rp	115.364.651.529,10
- Bantuan Keuangan	Rp	130.625.906.203,62
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp	1.266.307.329.391,72

6.3.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Rp949.134.029.659,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017, yang terdiri dari:

- Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	22.159.874.297,00
- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Rp	1.073.244.507,00
- Dana Alokasi Umum	Rp	722.184.384.000,00
- Dana Alokasi Khusus	Rp	203.716.526.855,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Rp	949.134.029.659,00

6.3.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak Rp22.159.874.297,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017. Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat selama TA 2017 adalah sebesar Rp22.159.874.297,00 dibanding anggaran yang ditetapkan sebesar Rp26.713.512.080,00 menunjukkan realisasi dibawah anggaran sebesar Rp4.553.637.783,00 atau 82,95% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan	2.633.540.000,00	2.117.823.921,00	(515.716.079,00)	80,42
2	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh Ps.21)	19.930.414.843,00	16.119.035.020,00	(3.811.379.823,00)	80,88
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan	68.499.000,00	80.139.438,00	11.640.438,00	116,99
4	Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan	3.330.000,00	5.453.015,00	2.123.015,00	163,75
5	Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan	91.442.000,00	102.915.031,00	11.473.031,00	112,55
6	Bagi Hasil dari PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kab/Kota	3.986.286.237,00	3.734.507.872,00	(251.778.365,00)	93,68
Jumlah		26.713.512.080,00	22.159.874.297,00	(4.553.637.783,00)	82,95

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak yang lebih rendah dari anggaran disebabkan oleh:

1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukan realisasi dibawah anggaran yang ditetapkan karena menurunnya bagi hasil pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan; dan

2. Penerimaan Pajak Penghasilan pribadi (termasuk PPh Pasal 21) menunjukkan realisasi dibawah anggaran yang ditetapkan.

6.3.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Rp1.073.244.507,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak untuk TA 2017 adalah sebesar Rp1.073.244.507,00 dibandingkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.049.661.225,48 menunjukkan realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dibawah anggaran sebesar Rp976.416.718,48 atau 52,36% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Sumber Daya Alam (Perikanan)	1.493.124.000,00	525.572.127,00	(967.551.873,00)	35,20
2	Bea Cukai Hasil Tembakau	556.537.225,48	547.672.380,00	(8.864.845,48)	98,41
Jumlah		2.049.661.225,48	1.073.244.507,00	(976.416.718,48)	52,36

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp1.073.244.507,00 atau 52,36% dibandingkan anggarannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam (Perikanan) menunjukkan realisasi sebesar Rp525.572.127,00 atau 35,20% dibandingkan anggarannya disebabkan karena sangat tergantung pada besarnya pendapatan Sumber Daya Alam yang diterima oleh Pemerintah Pusat; dan
2. Penerimaan Bagi Hasil Bea Cukai Tembakau menunjukkan realisasi dibawah anggaran yang ditetapkan.

6.3.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum Rp722.184.384.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017. Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum TA2017 adalah sebesarRp722.184.384.000,00 dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp722.184.384.000,00 menunjukkan realisasi sesuai anggaran yang ditetapkan atau 100%.

6.3.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus Rp203.716.526.855,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017. Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus TA 2017 adalah sebesar Rp203.716.526.855,00 dibawah anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp19.065.767.145,00 atau 91,44%. Pada tahun 2017 dilakukan pembayaran atas utang beban serta utang Belanja Modal untuk kegiatan dengan sumber dana DAK yang sudah direalisasikan secara fisik tidak bisa direalisasikan pembayarannya pada Tahun 2016. Hanya kegiatan fisik yang dicatat utang Belanja Modal yang bersumber dari DAK ditransfer oleh Pusat sebesar Rp33.666.854.000,00 pada tanggal 30 November 2017.

6.3.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Rp71.182.742.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Penyesuaian Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017 yang merupakan Dana Penyesuaian untuk dana desa.

6.3.1.2.2.1 Dana Penyesuaian Rp71.182.742.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Penyesuaian Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017. Realisasi Penerimaan Dana Penyesuaian untuk TA 2017 adalah sebesar Rp71.182.742.000,00 dibandingkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp71.182.742.000,00 menunjukkan realisasi Penerimaan Dana Penyesuaian sesuai anggaran yang telah ditetapkan atau 100%.

6.3.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi Rp115.364.651.529,10

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Transfer dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017, yang terdiri dari:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	Rp	115.364.651.529,10
- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp	0,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	Rp	115.364.651.529,10

6.3.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp115.364.651.529,10

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	39.737.120.463,85	38.750.923.928,20	(986.196.535,65)	97,52
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	38.399.222.694,88	30.503.762.984,09	(7.895.459.710,79)	79,44
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29.960.781.570,55	29.823.432.294,21	(137.349.276,34)	99,54
4	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	173.211.154,83	173.211.154,83	0,00	100,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	16.113.321.167,77	16.113.321.167,77	0,00	100,00
	Jumlah	124.383.657.051,88	115.364.651.529,10	(9.019.005.522,78)	92,75

6.3.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan pendapatan bagi hasil lainnya bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017.

6.3.1.2.4 Bantuan Keuangan Rp130.625.906.203,62

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali	56.265.447.363,00	54.772.575.314,52	(1.492.872.048,48)	97,35
2	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	83.464.110.800,31	75.853.330.889,10	(7.610.779.911,21)	90,88
Jumlah		139.729.558.163,31	130.625.906.203,62	(9.103.651.959,69)	93,48

6.3.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp60.964.904.061,13

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017, yang terdiri dari:

- Pendapatan Hibah	Rp	57.937.837.284,29
- Pendapatan Lainnya	Rp	3.027.066.776,84
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	Rp	60.964.904.061,13

6.3.1.3.1 Pendapatan Hibah Rp57.937.837.284,29

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Hibah bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017. Realisasi penerimaan Pendapatan Hibah untuk TA 2017 sebesar Rp57.937.837.284,29 dibandingkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp56.929.184.152,00 menunjukkan realisasi Pendapatan Hibah melebihi anggaran sebesar Rp1.008.653.132,29 atau 101,77%.

Realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp57.937.837.284,29 atau 101,77% dari anggarannya merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Hibah BOS dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri.

6.3.1.3.2 Pendapatan Lainnya Rp3.027.066.776,84

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Lainnya bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017 yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp3.027.066.776,84 yang ditujukan untuk Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Agung. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan pada rekening giro BPD Bali Nomor 022.02.02.44480-8 atas nama Peduli Gunung Agung Karangasem sebesar Rp3.026.830.966,74 dan pada rekening tabungan BPD Bali Nomor 022.02.02.44463-9 atas nama Bendahara Penanggulangan Bencana sebesar Rp235.810,10.

6.3.2 Belanja Daerah Rp1.506.221.682.564,41

Jumlah tersebut realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017, yang terdiri dari:

- Belanja Operasi	Rp	1.093.006.801.197,60
- Belanja Modal	Rp	237.069.886.363,00
- Belanja Tak terduga	Rp	826.041.200,00
- Belanja Transfer	Rp	175.318.953.803,81
Jumlah Belanja Daerah	Rp	1.506.221.682.564,41

Dari realisasi belanja daerah tersebut terdapat realisasi kegiatan dengan sumber dana DAK yang sudah direalisasikan secara fisik namun belum dibayar sebesar Rp34.225.509.832,00 pada tahun 2016.

Rincian anggaran Belanja Daerah yang tercatat utang jangka pendek Tahun 2016 dan direalisasikan pembayarannya Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BELANJA OPERASIONAL		
1	Dinas Kesehatan	Rp97.313.091,00
2	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Rp113.263.550,00
Jumlah		Rp210.576.641,00
BELANJA MODAL		
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp25.562.863.125,00
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Rp761.972.000,00
3	Dinas Kesehatan	Rp6.182.315.066,00
4	RSUD	Rp890.470.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp204.000.000,00
6	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Rp413.313.000,00
Jumlah		Rp34.014.933.191,00

Dari jumlah utang jangka pendek yang semestinya dibiayai dari DAK sebesar Rp34.014.933,191,00 hanya ditransfer sebesar Rp33.666.854.000,00 oleh pusat. Sehingga daerah menutupi kekurangan pembayaran utang jangka pendek tersebut.

6.3.2.1 Belanja Operasi Rp1.093.006.801.197,60

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari:

- Belanja Pegawai	Rp	712.006.526.726,93
- Belanja Barang	Rp	367.534.860.607,25
- Belanja Bunga	Rp	633.649.863,42
- Belanja Subsidi	Rp	0,00
- Belanja Hibah	Rp	11.370.600.000,00
- Belanja Bantuan Sosial	Rp	1.461.164.000,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp	1.093.006.801.197,60

6.3.2.1.1 Belanja Pegawai Rp712.006.526.726,93

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	447.281.845.619,76	437.789.903.801,00	(9.491.941.818,76)	97,88
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	217.216.717.877,69	213.026.556.060,00	(4.190.161.817,69)	98,07
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.947.000.000,00	4.757.900.000,00	(189.100.000,00)	96,18
4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	6.887.694.759,88	4.897.444.954,88	(1.990.249.805,00)	71,1
5	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	458.030.525,00	284.502.178,00	(173.528.347,00)	62,11
6	Insentif Jasa Pelayanan	27.762.283.600,00	29.109.110.033,05	1.346.826.433,05	104,85
7	Belanja Honorarium PNS	14.976.632.310,00	11.591.548.500,00	(3.385.083.810,00)	77,40

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
8	Belanja Honorarium Non PNS	9.437.011.100,00	8.076.978.000,00	(1.360.033.100,00)	85,59
9	Belanja Uang Lembur	1.160.397.804,00	975.804.000,00	(184.593.804,00)	84,09
10	Belanja Honorarium Dewan Pengawas BLUD	94.018.800,00	62.679.200,00	(31.339.600,00)	66,67
11	Belanja Uang Transport	3.965.700.000,00	1.434.100.000,00	(2.531.600.000,00)	36,16
Jumlah			712.006.526.726,93	(22.180.805.669,40)	96,98

Terjadi pelampauan realisasi belanja dari anggarannya untuk belanja Pengadaan alat – alat kesehatan/Kesehatan Hewan, Belanja Bahan Obat-obatan Rumah Sakit, Belanja Darah Siap Transfusi serta Insentif Jasa Pelayanan pada BLU RSUD sebesar Rp2.574.602.375,42 berdasarkan SK Direktur RSUD Kabupaten Karangasem Nomor 128 Tahun 2017 tanggal 30 Desember 2017.

6.3.2.1.2 Belanja Barang Rp367.534.860.607,25

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
A. Belanja Persediaan					
1	Belanja Bahan Pakai Habis	36.811.917.561,59	33.549.416.361,00	(3.262.501.200,59)	91,14
2	Belanja Bahan/Material	36.045.822.720,58	31.039.008.156,30	(5.006.814.564,28)	86,11
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.913.259.531,00	10.075.146.932,00	(1.838.112.599,00)	84,57
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.450.778.434,01	8.755.493.448,95	(3.695.284.985,06)	70,32
Jumlah belanja persediaan		97.221.778.247,18	83.419.064.898,25	(13.802.713.348,93)	85,80
B. Belanja Jasa					
1	Belanja Jasa Kantor	102.049.245.616,34	89.724.334.151,00	(12.324.911.465,34)	87,92
2	Belanja Premi Asuransi	805.501.000,00	752.197.000,00	(53.304.000,00)	93,38
3	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	676.627.117,00	396.481.500,00	(280.145.617,00)	58,60
4	Belanja Cetak dan Penggandaan - Fotocopy	3.706.646.278,00	3.204.446.308,00	(502.199.970,00)	86,45
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang / Parkir	1.722.139.002,00	1.031.879.192,00	(690.259.810,00)	59,92
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.440.345.302,00	943.667.150,00	(496.678.152,00)	65,52
7	Belanja Sewa Alat Berat	529.031.000,00	24.200.000,00	(504.831.000,00)	4,57
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.807.690.477,00	3.574.412.550,00	(233.277.927,00)	93,87
9	Belanja Makanan dan Minuman	37.063.448.800,00	28.960.737.425,00	(8.102.711.375,00)	78,14
10	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	994.640.000,00	973.334.000,00	(21.306.000,00)	97,86
11	Belanja Pakaian Kerja	1.348.389.450,00	1.304.560.750,00	(43.828.700,00)	96,75
12	Belanja Pakaian Khusus	2.484.550.707,00	2.297.176.300,00	(187.374.407,00)	92,46

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
	dan Hari-hari Tertentu				
13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.099.368.412,00	4.201.166.237,00	(1.898.202.175,00)	68,88
14	Belanja Jasa Konsultansi	8.353.485.500,00	7.129.949.800,00	(1.223.535.700,00)	85,35
15	Belanja Iuran Peserta PBI Daerah	23.988.623.502,00	20.277.444.000,00	(3.711.179.502,00)	84,53
16	Belanja Kerjasama	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	0,00
	Jumlah Belanja Jasa	195.105.732.163,34	164.795.986.363,00	(30.309.745.800,34)	84,46
	C. Belanja Pemeliharaan				
1	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.535.078.800,00	4.964.007.145,00	(571.071.655,00)	89,68
2	Belanja Pemeliharaan	22.979.552.957,00	20.434.026.616,00	(2.545.526.341,00)	88,92
	Jumlah Belanja Pemeliharaan	28.514.631.757,00	25.398.033.761,00	(3.116.597.996,00)	89,07
	D. Belanja Perjalanan Dinas	64.606.333.155,14	53.646.970.790,00	(10.959.362.365,14)	83,04
	E. Belanja Hibah Barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat	3.960.000.000,00	3.957.381.000,00	(2.619.000,00)	99,93
	F. Belanja Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat	11.429.963.513,00	11.000.527.081,00	(429.436.432,00)	96,24
	G. Belanja Lainnya				
1	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga – Hadiah	1.279.313.719,00	1.041.426.104,00	(237.887.615,00)	81,41
2	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga –Serahan Pelatihan	1.523.762.575,00	1.418.410.450,00	(105.352.125,00)	93,09
3	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	23.987.636.748,00	22.857.060.160,00	(1.130.576.588,00)	95,29
	Jumlah Belanja Lain-Lain	26.790.713.042,00	25.316.896.714,00	(1.473.816.328,00)	94,50
	Jumlah	427.629.151.877,66	367.534.860.607,25	(60.094.291.270,41)	85,95

6.3.2.1.3 Belanja Bunga

Rp633.649.863,42

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Bunga Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017. Realisasi pembayaran Bunga Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp633.649.863,42 dibandingkan anggarannya sebesar Rp700.000.000,00 menunjukkan realisasi Pembayaran Bunga dibawah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp66.350.136,58 atau 90,52%. Belanja bunga tersebut digunakan untuk membayar bunga atas Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada bagian Penjelasan Neraca poin 6.1.2.2.1.

6.3.2.1.4 Belanja Subsidi Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Subsidi Pajak Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017.

6.3.2.1.5 Belanja Hibah Rp11.370.600.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017. Realisasi Hibah Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp11.370.600.000,00 dibandingkan anggarannya sebesar Rp12.063.000.000,00 menunjukkan realisasi Hibah dibawah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp692.400.000,00 atau 94,26%.

6.3.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial Rp1.461.164.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017. Realisasi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp1.461.164.000,00 dibandingkan anggarannya sebesar Rp1.810.000.000,00 menunjukkan realisasi Bantuan Sosial dibawah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp348.836.000,00 atau 80,73%.

6.3.2.2 Belanja Modal Rp237.069.886.363,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Belanja Tanah	11.867.524.975,00	0,00	(11.867.524.975,00)	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	57.859.519.590,60	47.643.769.912,00	(10.215.749.678,60)	82,34
3	Belanja Gedung & Bangunan	66.784.117.927,00	60.248.410.581,00	(6.535.707.346,00)	90,21
4	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	139.770.719.249,00	111.925.459.217,00	(27.845.260.032,00)	80,08
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	20.186.502.236,50	17.252.246.653,00	(2.934.255.583,50)	85,46
6	Aset Lainnya				
Jumlah		296.468.383.978,10	237.069.886.363,00	(59.398.497.615,10)	79,96

Rincian belanja modal untuk masing-masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 18*.

6.3.2.3 Belanja Tak Terduga Rp826.041.200,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017. Realisasi Belanja Tak Terduga untuk TA 2017 sebesar Rp826.041.200,00 dibandingkan anggarannya sebesar Rp1.900.000.000,00 menunjukkan realisasi Belanja Tak Terduga pada Tahun 2017 dibawah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.073.958.800,00 atau 43,48%.

6.3.2.4 Transfer Rp175.318.953.803,81

Jumlah tersebut merupakan realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017 yang merupakan transfer/bagi hasil pendapatan

6.3.2.4.1 Bagi Hasil Pendapatan**Rp9.484.943.389,38**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Bagi Hasil Pajak Daerah	8.233.019.390,93	8.233.019.390,77	(0,16)	100,00
2	Bagi Hasil Retribusi	1.251.923.998,86	1.251.923.998,61	(0,25)	100,00
Jumlah		9.484.943.389,79	9.484.943.389,38	(0,41)	100,00

6.3.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan**Rp165.834.010.414,43**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi	6.511.828.501,43	6.511.828.501,43	0,00	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	141.424.240.431,00	141.424.240.431,00	0,00	100,00
3	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	811.765.832,00	797.941.482,00	(13.824.350,00)	98,30
4	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Desa Pakraman, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian	14.677.400.000,00	14.632.400.000,00	(45.000.000,00)	99,69
5	Belanja Bantuan Keuangan untuk Desa Pakraman Kecamatan Karangasem	297.600.000,00	297.600.000,00	0,00	100,00
6	Belanja Bantuan Keuangan untuk Banjar Adat Kecamatan Karangasem	1.235.000.000,00	1.170.000.000,00	(65.000.000,00)	94,74
7	Belanja Bantuan Keuangan untuk Subak dan Subak Abian Kecamatan Karangasem	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa	1.350.000.000,00	850.000.000,00	(500.000.000,00)	62,96
Jumlah		166.457.834.764,43	165.834.010.414,43	(623.824.350,00)	99,63

6.3.3 Pembiayaan**Rp102.468.867.011,05**

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus dan menutup defisit yang timbul dari selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan Pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

6.3.3.1 Penerimaan Pembiayaan**Rp125.239.937.529,69**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017. Realisasi Penerimaan Pembiayaan untuk TA 2017 sebesar Rp125.239.937.529,69 dibandingkan anggarannya sebesar Rp125.644.340.402,55 menunjukkan realisasi Penerimaan Pembiayaan dibawah anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp(404.402.872,86) atau 99,68%. Sumber penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu sebesar Rp125.188.456.552,69 dan Penerimaan Piutang Daerah dari Dana Bergulir sebesar Rp51.480.977,00. Penerimaan pembiayaan tersebut untuk menutup kebutuhan belanja tahun berjalan.

6.3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Rp22.771.070.518,64

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp22.771.070.518,64 dibandingkan anggarannya sebesar Rp22.785.197.601,00 menunjukkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan dibawah anggaran yang ditetapkan Rp14.127.082,36 atau 99,94% dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyertaan Modal sejumlah Rp3.600.000.000,00 dilakukan untuk penambahan modal di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem sebesar Rp1.000.000.000,00, PDAM Kabupaten Karangasem sebesar Rp2.100.000.000,00, dan PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp500.000.000,00 dalam bentuk kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan; dan
2. Pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp19.171.070.518,64 merupakan pembayaran atas pinjaman pemerintah pusat No. SLA-1134/DP3/2000, tanggal 5 April 2000 untuk membiayai Terminal Karang Sokong dan Pinjaman Pusat Investasi Pemerintah untuk Pembangunan Pasar Umum Amlapura Timur, dan Pembangunan RSUD Tipe C.

6.3.4 Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran Rp122.183.090.138,71

Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Tahun Anggaran 2017 memiliki nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp122.182.382.027,94 yaitu penjumlahan antara nilai Surplus/ (Defisit) Anggaran sebesar Rp19.713.515.016,89 dengan nilai pembiayaan netto sebesar Rp102.468.867.011,05 SILPA tersebut terdiri dari:

- Kas di Kas Daerah	Rp	107.201.056.359,84
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	88.108.990,00
- Kas di Bendahara BLUD	Rp	2.926.579.789,00
- Kas di Bendahara JKN	Rp	8.831.301.662,33
- Kas di Bendahara BOS	Rp	1.793.348.663,70
- Kas di Peduli Gunung Agung Karangasem	Rp	50.000,00
- Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana	Rp	1.342.644.673,84
Jumlah SILPA	Rp	<u>122.183.090.138,71</u>

Hal ini telah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada bagian neraca poin 6.1.1.1.5.

6.4 Penjelasan Pos Laporan Operasional

6.4.1 Kegiatan Operasional

Jumlah tersebut merupakan Surplus yang diperoleh dari Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017, dengan perhitungannya sebagai berikut:

- Pendapatan - LO	Rp	1.548.221.858.885,37
- Beban	Rp	(1.406.012.349.265,92)
Surplus dari Kegiatan Operasional	Rp	142.209.509.619,45

6.4.1.1 Pendapatan - LO **Rp1.548.221.858.885,37**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017, yang terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp	204.287.023.106,46
- Pendapatan Transfer - LO	Rp	1.257.215.105.971,59
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	Rp	86.719.729.807,32
Jumlah Pendapatan - LO	Rp	1.548.221.858.885,37

6.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO **Rp204.287.023.106,46**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017, yang terdiri dari:

- Pendapatan Pajak Daerah - LO	Rp	103.846.749.223,81
- Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Rp	11.728.099.636,50
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Rp	12.076.751.263,24
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	Rp	76.635.422.982,91
Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp	204.287.023.106,46

6.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO **Rp103.846.749.223,81**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Pajak Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam Laporan Operasional (LO) ini lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2017 sebesar Rp6.996.486.917,09. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan Pendapatan Pajak Daerah, yang dijelaskan sebagai berikut:

➤ Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Pajak Daerah LO dari Pendapatan Pajak Daerah LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan pendapatan LO atas piutang pajak yang pemungutannya berdasarkan <i>self assesment</i> Tahun 2017 berdasarkan inventarisasi piutang	20.674.841.879,07
2.	Pengakuan pendapatan LO atas ketentuan pajak yang pemungutannya berdasarkan <i>official assesment</i> Tahun 2017 yang belum dibayar	3.764.692.577,76
Jumlah		24.439.534.456,83

- Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Pajak Daerah LO dari Pendapatan Pajak Daerah LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengurangan Pendapatan Pajak Daerah LO atas piutang pajak yang pemungutannya berdasarkan <i>self assessment</i> Tahun 2016 (hotel, restoran, hiburan dan MBLB) pada Dinas Pendapatan	17.443.000.606,74
2.	Pengurangan Pendapatan Pajak Daerah LO atas penerimaan pajak TA 2016 yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan Dispenda tahun 2016	46.933,00
Jumlah		17.443.047.539,74

6.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO Rp11.728.099.636,50

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO ini lebih kecil dari Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2017 sebesar Rp862.372.176,76. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah, yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Retribusi Daerah LO dari Pendapatan Retribusi Daerah LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Reklasifikasi pendapatan diterima dimuka dari pendapatan sewa pada RSUD, Bagian Perlengkapan, dan Dinas Pariwisata	22.911.875,00
2.	Pengakuan pendapatan LO atas piutang retribusi menara telekomunikasi yang belum bayar pada Diskominfo Tahun 2017	344.294.396,00
Jumlah		367.206.271,00

- Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah LO dari Pendapatan Retribusi Daerah LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengurangan pendapatan retribusi LO atas pendapatan retribusi yang disetor Tahun 2017 yang merupakan pungutan retribusi Tahun 2016 yang belum disetor oleh bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan	162.242.719,76
2.	Reklasifikasi pendapatan diterima dimuka dari pendapatan sewa pada RSUD, Bagian Perlengkapan, dan Dinas Pariwisata	13.625.000,00
3.	Pengurangan pendapatan retribusi LO atas pendapatan retribusi yang disetor Tahun 2017 yang merupakan piutang retribusi Tahun 2016 pada Dinas Kesehatan	513.295.000,00
4.	Pengurangan pendapatan retribusi LO atas piutang retribusi Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016	540.415.728,00
Jumlah		1.229.578.447,76

6.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Rp12.076.751.263,24

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Pendapatan tersebut merupakan deviden dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, PDAM Kabupaten Karangasem dan PT Jamkrida Bali Mandara. Selain itu termasuk pengakuan kenaikan dan penurunan

ekuitas pada PDAM karena kepemilikan sebesar 100% dengan *equity method*. Kenaikan ekuitas PDAM yang diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah - LO sebesar Rp557.130.219,00.

6.4.1.1.1.4 Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Rp76.635.422.982,91

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO ini lebih kecil dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2017 sebesar Rp1.067.894.065,17. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pengakuan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang mempengaruhi penambahan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan pendapatan Lain lain PAD yang Sah - LO atas piutang denda pajak pada BPKAD Tahun 2017.	489.289.081,88
2.	Pengakuan pendapatan Lain lain PAD yang Sah - LO atas piutang BLUD pada RSUD Tahun 2017.	10.757.902.020,50
3.	Pengakuan pendapatan Lain lain PAD yang Sah -LO atas pendapatan yang sudah diterima sebelum Tahun 2017 dengan masa perjanjian sampai Tahun 2017 pada RSUD, Perlengkapan dan Dinas Pariwisata.	34.911.875,00
4.	Reklasifikasi pendapatan diterima dimuka dari pendapatan sewa pada RSUD, Bagian Perlengkapan, dan Dinas Pariwisata	13.625.000,00
Jumlah		11.295.727.977,38

- Pengakuan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang mempengaruhi pengurangan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengurangan pendapatan Lain lain PAD yang Sah - LO atas kas pada bendahara penerimaan RSUD Tahun 2016 yang disetor Tahun 2017.	Rp25.452.230,00
2.	Pengurangan pendapatan Lain lain PAD yang Sah - LO atas piutang BLU Tahun 2016 yang disetor Tahun 2017.	Rp11.892.880.107,00
3.	Pengurangan pendapatan Lain lain PAD yang Sah - LO atas pendapatan sewa yang diterima tahun 2017 namun merupakan pengakuan pendapatan LO setelah Tahun 2017 sesuai perjanjian.	Rp37.625.000,00
4.	Pengurangan pendapatan Lain lain PAD yang Sah – LO atas pelunasan piutang lainnya atas denda pajak pada BPKAD Tahun 2017	Rp384.752.830,55
5.	Reklasifikasi pendapatan diterima dimuka dari pendapatan sewa pada RSUD, Bagian Perlengkapan, dan Dinas Pariwisata	22.911.875,00
Jumlah		Rp12.363.622.042,55

6.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO Rp1.257.215.105.971,59

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Transfer - LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017 yang terdiri dari:

- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO Rp 949.134.029.659,00

- Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO	Rp	71.182.742.000,00
- Transfer Pemerintah Provinsi - LO	Rp	106.272.428.108,97
- Bantuan Keuangan - LO	Rp	130.625.906.203,62
Jumlah Pendapatan Transfer - LO	Rp	1.257.215.105.971,59

6.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Rp949.134.029.659,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016 yang terdiri dari:

- Dana Bagi Hasil Pajak - LO	Rp	22.159.874.297,00
- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	Rp	1.073.244.507,00
- Dana Alokasi Umum – LO	Rp	722.184.384.000,00
- Dana Alokasi Khusus - LO	Rp	203.716.526.855,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	Rp	949.134.029.659,00

6.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak - LO Rp22.159.874.297,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak - LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Jumlah tersebut sama dengan nilai penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dalam LRA TA 2017.

6.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO Rp1.073.244.507,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Jumlah tersebut sama dengan nilai penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dalam LRA TA 2017.

6.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum - LO Rp722.184.384.000,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Dana Alokasi Umum – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Jumlah tersebut sama dengan nilai penerimaan Dana Alokasi Umum dalam LRA TA 2017.

6.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus - LO Rp203.716.526.855,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Dana Alokasi Khusus – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Jumlah tersebut sama dengan nilai penerimaan Dana Alokasi Khusus dalam LRA TA 2017.

6.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Rp71.182.742.000,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017 yang merupakan pengakuan penerimaan Dana Penyesuaian untuk dana desa.

6.4.1.2.2.1 Dana Penyesuaian - LO Rp71.182.742.000,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Dana Penyesuaian – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Jumlah tersebut sama dengan nilai penerimaan Dana Penyesuaian dalam LRA TA 2017.

6.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi - LO Rp106.272.428.108,97

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017 yang terdiri dari:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi – LO	Rp	106.272.428.108,97
- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	Rp	0,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - LO	Rp	106.272.428.108,97

6.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO Rp106.272.428.108,97

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan bagi Hasil Pajak dari Provinsi – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dalam LO ini lebih kecil dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dalam LRA TA 2017 sebesar Rp9.092.223.420,13. Hal yang mempengaruhi perbedaan pengakuan pendapatan tersebut seperti pada uraian dibawah ini:

- Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA yaitu Pengakuan pendapatan LO atas piutang lainnya atas pendapatan transfer DBH dari Provinsi Bali Tahun 2017 sebesar Rp8.962.032.741,47
- Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA adalah piutang lainnya atas pendapatan transfer DBH dari Provinsi Bali tahun 2016 yang ditransfer Tahun 2017 sebesar Rp18.054.256.161,60.

6.4.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Jumlah tersebut sama dengan nilai Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dalam LRA TA 2017.

6.4.1.2.4 Bantuan Keuangan - LO Rp130.625.906.203,62

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Transfer Bantuan Keuangan – LO dari Pemerintah Provinsi serta dari Kabupaten Lainnya untuk Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017 yang terdiri dari:

- Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi – LO	Rp	54.772.575.314,52
- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	Rp	75.853.330.889,10
Jumlah Bantuan Keuangan - LO	Rp	130.625.906.203,62

6.4.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Rp86.719.729.807,32

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017, yang terdiri dari:

- Pendapatan Hibah	Rp	83.692.633.030,48
- Pendapatan Lainnya	Rp	3.027.096.776,84

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Rp 86.719.729.807,32

6.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO Rp83.692.633.030,48

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Hibah – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO ini lebih tinggi dari nilai Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2017 sebesar Rp25.754.795.746,19 dikarenakan adanya pengakuan pendapatan hibah non tunai berupa persediaan dan aset tetap yang menambah nilai Pendapatan Hibah dalam LO ini dari nilai Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2017 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Penerimaan Hibah Alat Kontrasepsi dari BKKBN Perwakilan Bali	317.064.000,00
2	Pendapatan hibah Obat-obatan pada RSUD	1.181.976.002,86
3.	Penerimaan Hibah Aset beberapa OPD	24.255.755.743,33
Jumlah		25.754.795.746,19

6.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya - LO Rp3.027.096.776,84

Jumlah tersebut merupakan pengakuan pendapatan Lainnya – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Jumlah tersebut sama dengan nilai dari Pendapatan Lainnya dalam LRA TA 2017.

6.4.1.2 Beban Rp1.406.012.349.265,92

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban untuk Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017 terdiri dari:

- Beban Pegawai	Rp	782.629.696.201,07
- Beban Persediaan	Rp	87.181.133.006,88
- Beban Jasa	Rp	93.075.333.369,57
- Beban Pemeliharaan	Rp	25.615.495.661,00
- Beban Perjalanan Dinas	Rp	53.643.475.790,00
- Beban Bunga	Rp	633.649.863,42
- Beban Subsidi	Rp	0,00
- Beban Hibah	Rp	11.418.046.000,00
- Beban Bantuan Sosial	Rp	12.461.691.081,00
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	133.626.757.656,05
- Beban Penyisihan Piutang	Rp	4.479.373.424,12
- Beban Transfer	Rp	175.318.953.803,81
- Beban Lain-Lain	Rp	25.928.743.409,00
Jumlah Beban	Rp	1.406.012.349.265,92

6.4.1.2.1 Beban Pegawai Rp782.629.696.201,07

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pegawai oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Pengakuan beban pegawai dalam LO ini lebih besar dari

Belanja Pegawai dalam LRA TA 2017 sebesar Rp70.623.169.474,14. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan Belanja Pegawai, yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pengakuan Beban Pegawai yang mempengaruhi penambahan Beban Pegawai dari Belanja Pegawai LRA pengakuan beban pegawai atas utang jangka pendek RSUD dan beberapa dinas penghasil Tahun 2017 sebesar Rp18.301.423.143,02 dan pengakuan beban pegawai dari realisasi pembayaran belanja barang dan jasa tenaga kerja non pegawai sebesar Rp62.357.183.525,00.
- Pengakuan Beban Pegawai yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dari Belanja Pegawai LRA adalah pengakuan beban pegawai atas utang jangka pendek RSUD dan beberapa dinas penghasil Tahun 2016 yang dibayar pada Tahun 2017 sebesar Rp10.635.685.049,88.

6.4.1.2.2 Beban Persediaan Rp87.181.133.006,88

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Persediaan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Pengakuan Beban Persediaan dalam LO ini lebih besar dari Belanja Persediaan dalam LRA sebesar Rp3.762.068.108,63. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan Beban Persediaan yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pengakuan Beban Persediaan yang mempengaruhi penambahan Beban Persediaan – LO dari Belanja Barang LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan beban persediaan- LO atas persediaan pada Tahun 2017.	10.899.758.516,57
2.	Pengakuan beban persediaan – LO atas kurang catat karcis pada Dinas Kesehatan Tahun 2016	13.508.000,00
3.	Pengakuan beban persediaan – LO atas penerimaan hibah Alkon dari BKKBN pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	317.064.000,00
4.	Pengakuan beban persediaan – LO atas penerimaan hibah obat-obatan pada RSUD	1.181.976.002,86
5.	Pengakuan beban persediaan – LO atas utang jangka pendek pada Tahun 2017	3.072.759.500,00
6.	Pengakuan beban persediaan atas kesalahan penjumlahan persediaan obat-obatan pada LPLPO Puskesmas Kubu I, Kubu II, Karangasem I, Karangasem II, UPT Laboratorium Kesehatan	13.022.424,22
Jumlah		15.498.088.443,65

- Pengakuan Beban Persediaan yang mempengaruhi pengurangan Beban Persediaan – LO dari Belanja Barang LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengurangan beban persediaan- LO atas belanja bahan pakai habis, material dan bahan,cetak, dll Tahun 2017 yang masih menjadi persediaan.	9.409.194.698,09
2.	Pengurangan beban persediaan – LO atas pembayaran utang jangka pendek Tahun 2016.	2.028.538.015,00
3.	Koreksi beban penyusutan atas persediaan yang belum dicatat pada Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan	207.845.457,00
4.	Pengakuan beban persediaan atas kesalahan penjumlahan persediaan obat-obatan pada LPLPO Puskesmas Rendang dan Puskesmas Abang I	1.114.496,93

No	Uraian	Jumlah
5.	Koreksi kurang beban penyusutan yang sudah diakui dari persediaan karcis yang tidak berlaku (diluar kegiatan operasional)	78.327.668,00
6.	Koreksi kurang beban persediaan atas persediaan yang menjadi peralatan dan mesin (diatas batas kapitalisasi)	11.000.000,00
Jumlah		11.736.020.335,02

6.4.1.2.3 **Beban Jasa** **Rp93.075.333.369,57**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Jasa oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Pengakuan Beban Jasa dalam LO ini lebih kecil dari Belanja Jasa dalam LRA sebesar Rp71.720.652.993,43. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan Beban Jasa yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pengakuan Beban Jasa yang mempengaruhi penambahan Beban Jasa – LO dari Belanja Jasa LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan beban jasa- LO atas belanja sewa dengan perjanjian lebih dari satu tahun yang Tahun 2017 masih menjadi beban atas perjanjian sebelum tahun 2017.	27.050.000,00
2.	Pengakuan beban jasa – LO atas utang jangka pendek pada beberapa OPD Tahun 2017.	395.339.253,00
3.	Koreksi kurang pengakuan hutang belanja listrik Dinas Kesehatan	80,00
Jumlah		422.389.333,00

- Pengakuan Beban Jasa yang mempengaruhi pengurangan Beban Jasa – LO dari Belanja Jasa LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengurangan beban jasa- LO atas belanja sewa Tahun 2017 yang masih mempunyai masa manfaat tahun berikutnya pada Dinas Pariwisata.	5.500.000,00
2.	Pengurangan beban jasa – LO atas pembayaran utang jangka pendek Tahun 2016.	7.087.467.801,43
3.	Koreksi beban jasa dari realisasi belanja jasa yang menjadi AT gedung dan bangunan dan KDP pada Kecamatan Rendang, Inspektorat dan Dinas PUPR	2.692.891.000,00
4.	Koreksi beban jasa dari dari realisasi pembayaran belanja barang dan jasa tenaga kerja non pegawai	62.357.183.525,00
Jumlah		72.143.042.326,43

6.4.1.2.4 **Beban Pemeliharaan** **Rp25.615.495.661,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pemeliharaan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Jumlah pengakuan Beban Pemeliharaan dalam LO ini lebih rendah dari Belanja Pemeliharaan dalam LRA TA 2017 sebesar Rp217.461.900,00. Hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Pengakuan Beban Pemeliharaan yang mempengaruhi penambahan Beban Pemeliharaan – LO dari Belanja Pemeliharaan LRA berasal dari realisasi belanja modal yang tidak menjadi aset pada Dinas Kesehatan, RSUD, dan Sekretariat DPRD sebesar Rp622.946.400,00,00
- Pengakuan Beban Pemeliharaan yang mempengaruhi pengurangan Beban Pemeliharaan – LO dari Belanja Pemeliharaan LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pembayaran utang jangka pendek Tahun 2016	5.637.500,00
2.	Realisasi belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi aset Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan Irigasi dan Jaringan	399.847.000,00
Jumlah		405.484.500,00

6.4.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas Rp53.643.475.790,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Perjalanan Dinas oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Jumlah pengakuan Beban Perjalanan Dinas dalam LO ini lebih kecil dari Belanja Perjalanan Dinas dalam LRA TA 2017 sebesar Rp3.495.000,00. Hal tersebut dikarenakan terdapat pencairan belanja perjalanan dinas Tahun 2017 yang merupakan utang pada Dinas Kesehatan Tahun 2016.

6.4.1.2.6 Beban Bunga Rp633.649.863,42

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bunga oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Jumlah pengakuan Beban Bunga dalam LO ini sama dengan belanja bunga LRA Tahun 2017. Rincian dapat dilihat pada rincian belanja bunga LRA.

6.4.1.2.7 Beban Subsidi Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Subsidi oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017.

6.4.1.2.8 Beban Hibah Rp11.418.046.000,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Hibah oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Jumlah tersebut lebih rendah nilai belanja Hibah pada LRA TA 2017 karena terdapat pengurangan atas Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/ Ketiga Dinas PUPR per 31 Desember 2017 yang belum diserahkan kepada penerima sebesar Rp3.900.000.000,00 dan koreksi pengakuan KDP dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa perencanaan namun belum diserahkan (Dinas PU dan Penataan Ruang) sebesar Rp9.935.000,00.

6.4.1.2.9 Beban Bantuan Sosial Rp12.461.691.081,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bantuan Sosial oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Jumlah tersebut sama dengan nilai belanja Bantuan Sosial pada LRA TA 2017. Rincian Beban Bantuan Sosial dapat dilihat pada rincian Belanja Bantuan Sosial LRA.

6.4.1.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp133.626.757.656,05

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017.

6.4.1.2.11 Beban Penyisihan Piutang Rp4.479.373.424,12

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Penyisihan Piutang oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017.

6.4.1.2.12 Beban Transfer **Rp175.318.953.803,81**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017 yang terdiri dari:

- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp	8.233.019.390,77
- Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp	1.251.923.998,61
- Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp	165.834.010.414,43
Jumlah Beban Transfer	Rp	175.318.953.803,81

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah **Rp8.233.019.390,77**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Jumlah tersebut sama dengan nilai belanja transfer bagi hasil pajak LRA Tahun 2017.

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya **Rp1.251.923.998,61**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Jumlah tersebut sama dengan nilai belanja transfer bagi hasil pendapatan lainnya LRA Tahun 2017.

**Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa** **Rp165.834.010.414,43**

Jumlah tersebut merupakan Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada provinsi untuk kewajiban sharing JKBM Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2016, desa dan partai politik oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2017. Jumlah tersebut sama dengan nilai belanja transfer Bantuan Keuangan LRA Tahun 2017.

6.4.1.2.13 Beban Lain-Lain **Rp25.928.743.409,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Lain-Lain oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Pengakuan Beban Lain-Lain tersebut berasal dari pengakuan beban atas belanja sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan Beban Lain-Lain dari Belanja Hadiah/Penghargaan dan serahan pelatihan	2.459.836.554,00
2.	Pengakuan Beban Lain-Lain dari Uang untuk Diberikan kepada masyarakat/Pihak Ketiga	22.857.060.160,00
3.	Koreksi realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin dan Gedung dan Bangunan yang menjadi <i>extracomptable</i> tahun 2017 pada 10 OPD	611.846.695,00
Jumlah		25.928.743.409,00

6.4.1.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional **Rp142.209.509.619,45**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017 merupakan selisih dari

Pendapatan – LO sebesar Rp1.548.221.858.885,37 dan beban sebesar Rp1.406.012.349.265,92.

6.4.2 Kegiatan Non Operasional Rp(9.181.793.549,73)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017 dengan perincian sebagai berikut:

- Surplus Non Operasional	Rp	0,00
- Defisit Non Operasional	Rp	(9.181.793.549,73)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(9.181.793.549,73)

6.4.2.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus/Keuntungan atas Penjualan Aset Non Lancar yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017.

6.4.2.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus/Keuntungan atas Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017.

6.4.2.3 Defisit Penjualan Aset Non Lancar Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Defisit/Kerugian atas Penjualan Aset Non Lancar yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017.

6.4.2.4 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Defisit/Kerugian atas Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017.

6.4.2.5 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (Rp9.181.793.549,73)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari:

- Kenaikan akumulasi laba PDAM	Rp	(798.757.921,73)
- Penghapusan Gedung dan Bangunan tahun 2017	Rp	(116.550.380,00)
- Persediaan yang tidak berlaku pada DPM & PTSP, Disdukcapil, dan Dinas Pariwisata	Rp	(88.777.668,00)
- Peralatan dan Mesin SMA/SMK ke Provinsi Bali	Rp	(1.777.694.400,00)
- Gedung dan Bangunan SMA/SMK ke Provinsi Bali	Rp	(5.768.215.680,00)
- Aset Tetap Lainnya SMA/SMK ke Provinsi Bali	Rp	(631.797.500,00)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(9.181.793.549,73)

6.4.2.6 Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Rp133.027.716.069,72

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017.

6.4.3 Pos Luar Biasa (Rp1.279.093.414,40)

Jumlah tersebut merupakan nilai Pos Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Karangasem yang terjadi selama TA 2017. Pos Luar Biasa tersebut terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Kabupaten Karangasem.

6.4.3.1 Pendapatan Luar Biasa Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Luar Biasa oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017.

6.4.3.2 Beban Luar Biasa Rp1.279.093.414,40

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Luar Biasa oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA2017. Jumlah tersebut sama dengan nilai belanja Tidak Terduga LRA Tahun 2017 sebesar Rp826.041.200,00 dan Kas di Bendahara BOS SMA/SMK per 31 Desember 2016 yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp453.052.214,40.

6.4.4 Surplus/(Defisit) – LO Rp131.748.622.655,32

Jumlah tersebut merupakan nilai Surplus atas Kegiatan Operasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017, yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	133.027.716.069,72
Pos Luar Biasa	Rp	<u>(1.279.093.414,40)</u>
Surplus Laporan Operasional	Rp	<u>131.748.622.655,32</u>

6.5 Penjelasan atas Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama tahun anggaran 2017. Tujuan pelaporan arus kas untuk menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun anggaran 2017 dan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2017.

6.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi pemerintah. Arus kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

6.5.1.1 Arus Masuk Kas

Pendapatan Pajak Daerah	96.850.262.306,72
Pendapatan Retribusi Daerah	12.579.623.340,26
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.519.621.044,16
Lain-Lain PAD yang Sah	77.601.719.758,08
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	22.159.874.297,00
Pendapatan Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.073.244.507,00
Pendapatan Dana Alokasi Umum	722.184.384.000,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus	203.716.526.855,00
Pendapatan Dana Penyesuaian	71.182.742.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	115.364.651.529,10
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00
Bantuan Keuangan	130.625.906.203,62
Pendapatan Hibah	57.937.837.284,29
Pendapatan Lainnya	3.027.066.776,84
Pendapatan Luar Biasa	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.525.911.568.892,07

6.5.1.2 Arus Keluar Kas

Belanja Pegawai	712.006.526.726,93
Belanja Barang dan Jasa	367.534.860.607,25
Belanja Bunga	633.649.863,42
Belanja Subsidi	0,00
Belanja Hibah	11.370.600.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.461.164.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00
Belanja Tak Terduga	826.041.200,00
Bagi Hasil Pajak	8.233.019.390,77
Bagi Hasil Retribusi	1.251.923.998,61

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	165.834.010.414,43
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.269.151.796.201,41
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	256.759.772.690,66

Selama TA 2017, arus kas masuk aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar Rp1.525.911.568.892,07 dan arus kas keluar sebesar Rp1.269.151.796.201,41, sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp256.759.772.690,66 yang digunakan untuk membiayai aktivitas lainnya. Termasuk dalam arus kas masuk Pendapatan Lainnya termasuk dana Sumbangan Masyarakat untuk penanggulangan bencana erupsi Gunung Agung sebesar Rp3.027.066.776,84 yang terdiri dari penerimaan pada rekening giro BPD Bali Nomor 022.02.02.44480-8 atas nama Peduli Gunung Agung Karangasem sebesar Rp3.026.830.966,74 dan pada rekening tabungan BPD Bali Nomor 022.02.02.44463-9 atas nama Bendahara Penanggulangan Bencana sebesar Rp235.810,10. Saldo pada rekening giro BPD Bali Nomor 022.02.02.44480-8 dipindahbukukan ke Kas Daerah sebesar Rp1.684.372.103,00 serta dipindahbukukan ke Rekening Bendahara Penanggulangan Bencana BPBD sebesar Rp1.342.408.863,74.

6.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/ INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Aktivitas investasi/investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas investasi/investasi aset non keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

6.5.2.1 Arus Masuk Kas

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.336.800,00
Jumlah Arus Masuk Kas	24.336.800,00

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi/investasi aset non keuangan tersebut berasal dari penjualan perlengkapan/peralatan kantor tidak dipakai, penjualan sisa bahan bekas bangunan yang asetnya telah dihapuskan dari daftar aset tetap, dan penjualan hasil perikanan.

6.5.2.2 Arus Keluar Kas

Belanja Tanah	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	47.643.769.912,00
Belanja Gedung dan Bangunan	60.248.410.581,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	111.925.459.217,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	17.252.246.653,00
Belanja Aset Lainnya	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.600.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	240.669.886.363,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	(240.645.549.563,00)

Selama TA 2017, arus kas masuk bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar Rp24.336.800,00 dan arus kas keluar sebesar Rp240.669.886.363,00 sehingga terdapat kekurangan kas untuk membiayai aktivitas investasi/investasi aset non keuangan sebesar Rp240.645.549.563,00. Kekurangan tersebut dibiayai dari aktivitas lainnya.

6.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Arus kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017 yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

6.5.3.1	Arus Masuk Kas	
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	51.480.977,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	51.480.977,00
6.5.3.2	Arus Keluar Kas	
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah	19.171.070.518,64
	Jumlah Arus Keluar Kas	19.171.070.518,64
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	(19.119.589.541,64)

Selama TA 2017, arus kas masuk dari aktivitas pendanaan/pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar Rp51.480.977,00 dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan/pembiayaan sebesar Rp19.171.070.518,64 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan sebesar Rp19.119.589.541,64.

6.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/ NON ANGGARAN

Arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017. Arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

6.5.4.1	Arus Masuk Kas	
	Iuran Wajib Pegawai	6.277.985.749,00
	Pajak Penghasilan Pasal.21	27.064.665.046,00
	Pajak Penghasilan Pasal 22	1.013.411.100,00
	Pajak Penghasilan Pasal 23	718.211.346,00
	Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	4.540.924.874,00
	PPN	26.869.600.947,00
	Taperum	624.230.000,00

Taspen	24.681.373.096,00
BPJS	9.284.723.258,00
PFK Lainnya	22.362.560,00
JKK	679.652.609,00
JKM	849.561.064,00
Jumlah Arus Masuk Kas	102.626.701.649,00

6.5.4.2 Arus Keluar Kas

Iuran Wajib Pegawai	6.277.985.749,00
Pajak Penghasilan Pasal.21	27.064.665.046,00
Pajak Penghasilan Pasal 22	1.013.411.100,00
Pajak Penghasilan Pasal 23	718.211.346,00
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	4.540.924.874,00
PPN	26.869.600.947,00
Taperum	624.230.000,00
Taspen	24.681.373.096,00
BPJS	9.284.723.258,00
PFK Lainnya	22.362.560,00
JKK	679.652.609,00
JKM	849.561.064,00
Utang PFK pada FKTP	5.000.000,00
Koreksi Kesalahan Bank	1.212.500,00
Jumlah Arus Keluar Kas	102.632.914.149,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (6.212.500,00)

Selama TA 2017, arus kas masuk dari aktivitas transitoris/non anggaran Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar Rp102.626.701.649,00 dan arus kas keluarnya sebesar Rp102.632.914.149,00, sehingga arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp(6.212.500,00).

6.5.5 KENAIKAN/ (PENURUNAN) KAS SELAMA PERIODE INI (3.011.578.913,98)

Jumlah penurunan kas selama periode tahun 2017 sebesar Rp(3.011.578.913,98) yang merupakan jumlah keseluruhan arus kas bersih aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

6.5.6 SALDO AWAL KAS DI BUD 125.650.552.902,55

Saldo awal Kas di BUD merupakan saldo akhir kas di BUD tahun 2016 sebesar Rp125.650.552.902,55.

6.5.7 KOREKSI SALDO AWAL KAS DI BUD (455.883.849,86)

Jumlah koreksi saldo awal Kas di BUD terdiri dari koreksi saldo awal Kas di Bendahara BOS sebesar Rp(2.831.635,46) dan koreksi saldo Kas di Bendahara BOS SMA/SMK yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp453.052.214,40.

6.5.8 SALDO AKHIR KAS DI BUD 122.183.090.138,71

Saldo akhir Kas di BUD sebesar Rp122.183.090.138,71 diperoleh dari penjumlahan penurunan kas periode tahun 2017 sebesar Rp(3.011.578.913,98) dengan saldo awal Kas di BUD sebesar Rp125.650.552.902,55 dan koreksi saldo awal Kas di BUD sebesar Rp(455.883.849,86).

6.5.9 SALDO AKHIR KAS 122.183.090.138,71

Jumlah saldo sebesar Rp122.183.090.138,71 merupakan Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2017 yang jumlahnya harus sama dengan SILPA LRA, Saldo Anggaran Lebih LPSAL, dan SILPA Neraca 31 Desember 2017 dengan perincian sebagai berikut:

1) Kas di Kas Daerah	Rp	107.201.056.359,84
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
3) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	88.108.990,00
4) Kas di Bendahara BLUD	Rp	2.926.579.789,00
5) Kas di Bendahara JKN	Rp	8.831.301.662,33
6) Kas di Bendahara BOS	Rp	1.793.348.663,70
7) Kas di Peduli Gunung Agung Karangasem	Rp	50.000,00
8) Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana	Rp	1.342.644.673,84
Jumlah	Rp	122.183.090.138,71

6.6 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan saldo SILPA atau SIKPA pada tahun pelaporan yaitu Tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya.

6.6.1 Saldo Anggaran Lebih Awal **Rp125.644.340.402,55**

Jumlah tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Tahun Anggaran 2017 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2016, yang terdiri dari:

1. Kas di Kas Daerah	Rp	118.967.157.856,36
2. Kas di Bendahara BLUD	Rp	3.131.930.393,54
3. Kas di Bendahara JKN	Rp	1.536.936.233,38
4. Kas di Bendahara BOS	Rp	2.008.315.919,27
Jumlah	Rp	125.644.340.402,55

6.6.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan **Rp(125.188.456.552,69)**

Jumlah tersebut merupakan SILPA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2016 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2017 dan digunakan seluruhnya dalam operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2017 sebesar Rp(125.188.456.552,69).

6.6.3 Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) **Rp122.183.090.138,71**

6.6.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya **Rp(455.883.849,86)**

Koreksi kesalahan pembukuan terdiri dari koreksi saldo awal Kas di Bendahara BOS sebesar Rp2.831.635,46 dan Kas di Bendahara BOS SMA/SMK yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp453.052.214,40.

6.6.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir **Rp122.183.090.138,71**

Jumlah tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih TA 2017 yang jumlahnya sama dengan SILPA LRA, Saldo Akhir LAK, dan SILPA Neraca 31 Desember 2017.

6.7 Pengungkapan Informasi untuk Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja

Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak menerapkan basis akrual atas pendapatan dan belanja, seluruh nilai-nilai dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disajikan dengan basis kas. Sehingga tidak perlu dilakukan rekonsiliasi dengan basis kas. Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul karena penerapan basis akrual. Pos-pos aset seperti: Sewa Dibayar Dimuka, Biaya Dibayar Dimuka, Pendapatan/Laba yang Masih Harus Diterima, dan pos kewajiban seperti: Utang Bunga, Laba Diterima Dimuka timbul murni karena penerapan basis akrual pada pos aset dan kewajiban tidak mempengaruhi pos-pos pendapatan dan belanja.

BAB VII

Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Pada tahun 2017 diterapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini menggantikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem dan dalam penerapannya mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah karena terjadi perubahan nomenklatur OPD dimana terdapat beberapa penggabungan urusan dan fungsi OPD, penggantian nama OPD serta pemisahan urusan dan fungsi OPD.

Pada tahun 2017 Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2016 untuk menunjang pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintah adalah

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8. Dinas Sosial
9. Dinas Ketenagakerjaan
10. Dinas Pemadam Kebakaran
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Dinas Perhubungan
18. Dinas Komunikasi dan Informatika
19. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
20. Dinas Kebudayaan
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23. Dinas Pariwisata
24. Dinas Perikanan
25. Dinas Pertanian
26. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27. Satuan Polisi Pamong Praja
28. Rumah Sakit Umum Daerah
29. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
31. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
32. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34. Kecamatan Karangasem

35. Kecamatan Kubu
36. Kecamatan Abang
37. Kecamatan Bebandem
38. Kecamatan Selat
39. Kecamatan Manggis
40. Kecamatan Rendang
41. Kecamatan Sidemen

Dalam Tahun 2017 terjadi pergantian manajemen baru dalam pemerintahan, beberapa pejabat eksekutif mengalami pergantian karena mutasi ataupun pensiun, namun tidak terdapat perubahan kebijakan yang material dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian tidak ada dijumpai adanya kesalahan yang sangat material dari kebijakan manajemen yang perlu dan telah dikoreksi oleh manajemen.

Tidak terdapat komitmen dan kontijensi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan pihak lain. Sehingga tidak ada pengaruh dalam penyajian laporan keuangan,

Amlapura, 24 Agustus 2018

BUPATI KARANGASEM



I GUSTI AYU MAS SUMATRI



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Reff CaLK	Tahun 2017	Tahun 2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	6.5.1		
Arus Masuk Kas	6.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah		96.850.262.306,72	117.782.188.084,34
Pendapatan Retribusi Daerah		12.590.471.840,26	15.984.975.219,86
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11.519.621.044,16	13.592.314.005,36
Lain-lain PAD yang Sah		77.678.980.248,08	85.095.224.860,02
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak		22.159.874.297,00	21.458.384.197,00
Pendapatan Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		1.073.244.507,00	989.021.895,00
Pendapatan Dana Alokasi Umum		722.184.384.000,00	732.963.859.000,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus		203.716.526.855,00	182.216.756.500,00
Pendapatan Dana Penyesuaian		71.182.742.000,00	49.301.984.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		115.364.651.529,10	102.832.586.478,39
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-
Bantuan Keuangan		130.625.906.203,62	-
Pendapatan Hibah		57.937.837.284,29	73.937.389.816,20
Pendapatan Lainnya		3.027.066.776,84	65.680.351.739,63
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		1.525.911.588.892,07	1.461.835.037.795,80
Arus Keluar Kas	6.5.1.2		
Belanja Pegawai		712.006.526.726,93	778.530.682.421,10
Belanja Barang dan Jasa		367.534.860.607,25	300.494.138.056,40
Belanja Bunga		633.649.863,42	2.580.813.297,58
Belanja Subsidi		-	-
Belanja Hibah		11.370.600.000,00	5.882.089.097,00
Belanja Bantuan Sosial		1.481.164.000,00	901.010.000,00
Belanja Bantuan Keuangan		-	158.105.735.770,19
Belanja Tak Terduga		826.041.200,00	163.681.200,00
Bagi Hasil Pajak		8.233.019.390,77	12.151.726.735,06
Bagi Hasil Retribusi		1.251.923.998,61	1.578.583.763,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		165.834.010.414,43	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		1.269.151.796.201,41	1.260.388.460.340,33
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		256.759.772.690,66	201.446.577.455,47
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	6.5.2		
Arus Masuk Kas	6.5.2.1		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		24.336.800,00	189.311.060,00
Jumlah Arus Masuk Kas		24.336.800,00	189.311.060,00
Arus Keluar Kas	6.5.2.2		
Belanja Tanah		-	-
Belanja Peralatan dan Mesin		47.643.769.912,00	36.851.218.597,10
Belanja Gedung dan Bangunan		60.248.410.581,00	55.713.764.319,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		111.925.459.217,00	83.450.588.309,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		17.252.246.653,00	14.422.408.161,00
Belanja Aset Lainnya		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		3.600.000.000,00	4.500.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		240.669.886.383,00	194.937.979.386,10
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(240.645.549.583,00)	(194.748.668.326,10)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	6.5.3		
Arus Masuk Kas	6.5.3.1		
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		51.480.977,00	9.507.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		51.480.977,00	9.507.000,00
Arus Keluar Kas	6.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		19.171.070.518,64	23.748.372.917,64
Jumlah Arus Keluar Kas		19.171.070.518,64	23.748.372.917,64
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(19.119.589.541,64)	(23.738.865.917,64)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	6.5.4		
Arus Masuk Kas	6.5.4.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		102.626.701.649,00	100.203.248.910,07
Jumlah Arus Masuk Kas		102.626.701.649,00	100.203.248.910,07

Uraian	Reff CaLK	Tahun 2017	Tahun 2016
Arus Keluar Kas	6.5.4.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		102.632.914.149,00	100.197.036.410,07
Jumlah Arus Keluar Kas		102.632.914.149,00	100.197.036.410,07
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(6.212.500,00)	6.212.500,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas selama Periode ini	6.5.5	(3.011.578.913,98)	(17.034.744.288,27)
Saldo Awal Kas di BUD	6.5.6	125.650.552.902,55	142.685.297.190,82
Koreksi Saldo Awal Kas di BUD	6.5.7	(455.883.849,86)	-
Saldo Akhir Kas di BUD	6.5.8	122.183.090.138,71	125.650.552.902,55
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	187.741.882,76
Saldo Akhir Kas di B. Pengeluaran		-	-
Saldo Akhir Kas di Rekening Peduli Gunung Agung		-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana		-	-
Saldo Akhir Kas	6.5.9	122.183.090.138,71	125.838.294.785,31

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



 Amlapura, 24 Agustus 2018
BUPATI KARANGASEM

I GUSTI AYU MAS SUMATRI



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Reff CaLK	2017	2016	Kenaikan/ (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL	6.4.1				
PENDAPATAN - LO	6.4.1.1	1.548.221.858.885,37	1.475.538.416.472,56	72.683.442.412,81	4,93
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	6.4.1.1.1	204.287.023.106,46	250.618.032.877,33	(46.331.009.770,87)	(18,49)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	6.4.1.1.1.1	103.846.749.223,81	129.161.868.598,32	(25.315.119.374,51)	(19,60)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	6.4.1.1.1.2	11.728.099.636,50	16.629.845.716,86	(4.901.746.080,38)	(29,48)
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	6.4.1.1.1.3	12.076.751.263,24	13.592.314.005,36	(1.515.562.742,12)	(11,15)
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	6.4.1.1.1.4	76.635.422.982,91	91.234.004.556,79	(14.598.581.573,88)	(16,00)
PENDAPATAN TRANSFER	6.4.1.2	1.257.215.105.971,59	1.083.720.361.256,20	173.494.744.715,39	16,01
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	6.4.1.2.1	949.134.029.659,00	937.628.021.592,00	11.506.008.067,00	1,23
Dana Bagi Hasil Pajak - LO	6.4.1.2.1.1	22.159.874.297,00	21.458.384.197,00	701.490.100,00	3,27
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	6.4.1.2.1.2	1.073.244.507,00	989.021.895,00	84.222.612,00	8,52
Dana Alokasi Umum - LO	6.4.1.2.1.3	722.184.384.000,00	732.963.859.000,00	(10.779.475.000,00)	(1,47)
Dana Alokasi Khusus - LO	6.4.1.2.1.4	203.716.528.856,00	182.216.756.500,00	21.500.000,00	11,80
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - Dana Penyesuaian - LO	6.4.1.2.2	71.182.742.000,00	49.301.984.000,00	21.880.758.000,00	44,38
Transfer Pemerintah Provinsi - LO	6.4.1.2.2.1	71.182.742.000,00	49.301.984.000,00	21.880.758.000,00	44,38
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO	6.4.1.2.3.1	106.272.428.108,97	96.790.355.664,20	9.482.072.444,77	9,80
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	6.4.1.2.3.2	-	-	-	-
Bantuan Keuangan - LO	6.4.1.2.4	130.625.906.203,62	-	130.625.906.203,62	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi - LO	-	54.772.575.314,52	-	54.772.575.314,52	-
Bantuan Keuangan dari Kabupaten - LO	-	75.853.330.889,10	-	75.853.330.889,10	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6.4.1.3	86.719.729.807,32	141.200.022.339,03	(54.480.292.531,71)	(38,58)
Pendapatan Hibah	6.4.1.3.1	83.862.633.030,48	75.519.670.599,40	8.172.962.431,08	10,82
Pendapatan Lainnya	6.4.1.3.2	3.027.096.776,84	86.680.351.739,63	(62.653.254.962,79)	(95,39)
JUMLAH PENDAPATAN		1.548.221.858.885,37	1.475.538.416.472,56	72.683.442.412,81	4,93
BEBAN	6.4.1.2	1.406.012.349.265,92	1.383.793.261.441,20	22.219.087.824,72	1,61
Beban Pegawai	6.4.1.2.1	782.829.696.201,07	780.214.447.215,41	2.415.248.985,66	0,31
Beban Persediaan	6.4.1.2.2	97.181.133.006,88	86.521.387.685,80	659.745.321,28	0,76
Beban Jasa	6.4.1.2.3	93.075.333.369,57	133.689.966.669,71	(40.614.633.300,14)	(30,38)
Beban Pemeliharaan	6.4.1.2.4	25.615.495.661,00	25.951.746.028,00	(336.250.367,00)	(1,30)
Beban Perjalanan Dinas	6.4.1.2.5	53.843.475.790,00	48.043.259.468,00	5.800.216.322,00	11,68
Beban Bunga	6.4.1.2.6	633.649.863,42	2.580.813.297,58	(1.947.163.434,16)	(75,45)
Beban Subsidi	6.4.1.2.7	-	-	-	-
Beban Hibah	6.4.1.2.8	11.418.046.000,00	8.028.367.097,00	3.391.678.903,00	42,26
Beban Bantuan Sosial	6.4.1.2.9	12.461.691.081,00	5.078.965.607,00	7.382.725.474,00	145,36
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.4.1.2.10	133.626.757.656,05	112.128.889.125,96	21.497.868.530,09	19,17
Beban Penyisihan Piutang	6.4.1.2.11	4.479.373.424,12	2.367.274.222,69	2.112.099.201,43	89,22
Beban Transfer	6.4.1.2.12	175.318.953.803,81	171.836.046.288,25	3.482.907.535,56	2,03
Beban Lain-Lain	6.4.1.2.13	25.928.743.409,00	7.354.116.756,00	18.574.626.653,00	252,57
JUMLAH BEBAN		1.406.012.349.265,92	1.383.793.261.441,20	22.219.087.824,72	1,61
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	6.4.1.3	142.209.509.619,45	91.745.155.031,36	50.464.354.588,09	55,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL	6.4.2	(9.181.793.549,73)	(345.717.818,00)	(8.836.075.731,73)	2.555,86
Surplus Non Operasional		-	-	-	-
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	6.4.2.1	-	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	6.4.2.2	-	-	-	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	-	-
Defisit Non Operasional		9.181.793.549,73	-	9.181.793.549,73	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	6.4.2.3	-	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	6.4.2.4	-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	9.181.793.549,73	-	9.181.793.549,73	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	6.4.2.5	(9.181.793.549,73)	(345.717.818,00)	(8.836.075.731,73)	2.555,86
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	6.4.2.6	133.027.716.069,72	91.399.437.213,36	41.628.278.856,36	45,55

Uraian	Reff CaLK	2017	2016	Kenaikan/ (Penurunan)	%
POS LUAR BIASA	6.4.3	(1.279.093.414,40)	(163.681.200,00)	(1.115.412.214,40)	681,45
Pendapatan Luar Biasa	6.4.3.1	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	6.4.3.2	1.279.093.414,40	163.681.200,00	1.115.412.214,40	681,45
JUMLAH POS LUAR BIASA		(1.279.093.414,40)	(163.681.200,00)	(1.115.412.214,40)	681,45
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	6.4.4	131.748.622.655,32	91.235.756.013,36	40.512.866.641,96	44,40

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Reff CaLK	2017	2016
Ekuitas Awal	6.2.1	1.398.745.977.135,29	1.227.911.800.367,30
Surplus/(Defisit) LO	6.2.2	131.748.622.655,32	91.235.756.013,38
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:	6.2.3	(10.202.137.774,55)	79.598.420.754,63
<i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan:</i>	6.2.3.1	(2.739.383.026,94)	46.947.170.336,78
Koreksi peralatan dan mesin <i>extracomptable</i>		(2.842.394.343,34)	-
Koreksi gedung dan bangunan <i>extracomptable</i>		(1.104.035.900,00)	-
Koreksi akumulasi penyusutan <i>extracomptable</i>		1.207.047.216,40	-
Penyesuaian Akumulasi Aset Tetap		-	21.411.308.571,48
Koreksi ekuitas lainnya		-	25.535.861.765,30
<i>Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar:</i>	6.2.3.2	(7.462.754.747,61)	32.651.250.417,85
Koreksi saldo awal kas di bendahara BOS		(2.831.635,46)	-
Koreksi saldo awal piutang PBB-P2		3.487.964,00	-
Koreksi saldo awal piutang retribusi telekomunikasi		(2.862.589,00)	-
Koreksi piutang lainnya		55.122.687,32	-
Koreksi penyisihan piutang pajak		26.179.550,84	-
Koreksi penyisihan piutang retribusi kesehatan		5.132.950,00	-
Koreksi penyisihan piutang bagi hasil pajak provinsi		89.620.327,41	-
Koreksi penyisihan piutang lainnya		101.168.163,92	-
Koreksi saldo awal persediaan		(16.847.000,00)	-
Pengembalian dana bergulir Disperindag		51.480.977,00	-
Koreksi Tanah		3.199.316.501,75	-
Koreksi peralatan dan mesin		1.513.375.339,89	-
Reklasifikasi dan koreksi gedung dan bangunan		5.808.634.790,52	-
Reklasifikasi dan koreksi Jalan Irigasi dan Jaringan		(46.145.211.944,48)	-
Reklasifikasi dan koreksi aset tetap lainnya		(11.827.603.322,00)	-
Reklasifikasi dan koreksi konstruksi dalam pengerjaan		(1.048.520.054,00)	-
Reklasifikasi dan koreksi akumulasi penyusutan		3.269.423.201,30	-
Koreksi aset lain-lain		(301.448.466,00)	-
Pembayaran bagian lancar utang jangka panjang TA 2016		33.329.558.931,46	-
Pembayaran utang bunga TA 2016		647.662.353,01	-
Lain-lain PAD yang sah RSUD Tahun 2016 belum diakui		(24.000.000,00)	-
Koreksi Pendapatan Hibah Aset		3.806.406.524,91	-
Koreksi Kesalahan Pencatatan Piutang		-	(40,00)
Koreksi Penyisihan Piutang		-	54.494,10
Koreksi ekuitas lainnya		-	32.651.195.963,75
Ekuitas Akhir	6.2.4	1.520.292.462.016,06	1.398.745.977.135,29

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


Amlapura, 24 Agustus 2018
BUPATI KARANGASEM
IGUSTI AYU MAS SUMATRI



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Reff CaLK	2017	2016
Saldo Anggaran Lebih Awal	6.6.1	125.644.340.402,55	142.860.983.611,81
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	6.6.2	(125.188.456.552,69)	(142.685.297.190,82)
Subtotal		455.883.849,86	175.686.420,99
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA)	6.6.3	122.183.090.138,71	125.644.340.402,55
Subtotal		122.638.973.988,57	125.820.026.823,54
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-Lain	6.6.4	(455.883.849,86)	(175.686.420,99)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	6.6.5	122.183.090.138,71	125.644.340.402,56

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Amlapura, 24 Agustus 2018
BUPATI KARANGASEM

I GUSTI AYU MAS SUMATRI



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Reff. CaLK	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2016
PENDAPATAN	6.3.1	1.547.841.503.604,76	1.525.935.905.692,07	98,68	1.462.024.348.855,80
PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.3.1.1	180.202.138.829,09	198.663.672.239,22	110,24	232.644.013.229,58
Pendapatan Pajak Daerah	6.3.1.1.1	83.386.371.000,00	96.850.262.306,72	115,15	117.782.188.084,34
Pendapatan Retribusi Daerah	6.3.1.1.2	10.494.269.768,72	12.590.471.840,26	119,97	15.984.975.219,86
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.3.1.1.3	11.450.865.530,25	11.519.621.044,16	100,60	13.592.314.005,36
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.3.1.1.4	74.870.632.530,12	77.703.317.048,08	103,78	85.284.535.920,02
PENDAPATAN TRANSFER	6.3.1.2	1.309.025.808.520,67	1.266.307.329.391,72	96,74	1.089.762.594.070,39
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	6.3.1.2.1	973.729.851.305,48	949.134.029.659,00	97,47	837.628.021.592,00
Dana Bagi Hasil Pajak	6.3.1.2.1.1	26.713.512.080,00	22.159.874.297,00	82,95	21.458.384.197,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	6.3.1.2.1.2	2.049.661.225,48	1.073.244.507,00	52,36	989.021.895,00
Dana Alokasi Umum	6.3.1.2.1.3	722.184.384.000,00	722.184.384.000,00	100,00	732.963.859.000,00
Dana Alokasi Khusus	6.3.1.2.1.4	222.782.294.000,00	203.716.526.855,00	91,44	182.216.756.500,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	6.3.1.2.2	71.182.742.000,00	71.182.742.000,00	100,00	49.301.984.000,00
Dana Penyesuaian	6.3.1.2.2.1	71.182.742.000,00	71.182.742.000,00	100,00	49.301.984.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	6.3.1.2.3	124.383.657.051,88	115.364.651.529,10	92,75	102.832.588.478,39
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	6.3.1.2.3.1	124.383.657.051,88	115.364.651.529,10	92,75	102.832.588.478,39
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	6.3.1.2.3.2	-	-	-	-
Bantuan Keuangan	6.3.1.2.4	139.729.558.163,31	130.625.906.203,82	83,48	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	56.265.447.363,00	54.772.575.314,62	97,35	-
Bantuan Keuangan dari Kabupaten	-	83.464.110.800,31	75.853.330.889,10	90,88	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6.3.1.3	58.613.556.255,00	60.964.904.061,13	104,01	139.617.741.555,83
Pendapatan Hibah	6.3.1.3.1	56.929.184.152,00	57.937.837.284,29	101,77	73.937.389.816,20
Pendapatan Lainnya	6.3.1.3.2	1.684.372.103,00	3.027.066.776,84	179,71	65.680.351.739,63
JUMLAH PENDAPATAN		1.547.841.503.604,76	1.525.935.905.692,07	98,58	1.462.024.348.855,80
BELANJA DAERAH	6.3.2	1.650.700.646.406,31	1.506.221.682.564,41	91,25	1.450.826.439.726,43
BELANJA OPERASI	6.3.2.1	1.176.389.484.273,89	1.093.006.801.197,60	92,91	1.088.388.732.872,08
Belanja Pegawai	6.3.2.1.1	734.187.332.396,33	712.006.526.726,93	96,98	778.530.682.421,10
Belanja Barang	6.3.2.1.2	427.629.151.877,66	367.534.860.607,25	85,95	300.494.138.056,40
Belanja Bunga	6.3.2.1.3	700.000.000,00	633.649.863,42	90,52	2.580.813.297,56
Belanja Subsidi	6.3.2.1.4	-	-	-	-
Belanja Hibah	6.3.2.1.5	12.063.000.000,00	11.370.600.000,00	94,26	5.882.089.097,00
Belanja Bantuan Sosial	6.3.2.1.6	1.810.000.000,00	1.461.164.000,00	80,73	901.010.000,00
BELANJA MODAL	6.3.2.2	296.468.383.978,10	237.069.888.363,00	79,96	190.437.979.386,10
Belanja Modal - Tanah	-	11.867.524.875,00	-	-	-
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	-	57.859.519.590,60	47.643.769.912,00	82,34	36.851.218.597,10
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	-	66.784.117.927,00	60.248.410.591,00	90,21	55.713.764.319,00
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	139.770.719.249,00	111.925.459.217,00	80,08	83.450.588.309,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	-	20.166.502.236,50	17.252.246.653,00	85,46	14.422.406.161,00
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-
BELANJA TAK TERDUGA	6.3.2.3	1.900.000.000,00	826.041.200,00	43,48	163.681.200,00
Belanja Tak Terduga	-	1.900.000.000,00	826.041.200,00	43,48	163.681.200,00
BELANJA TRANSFER	6.3.2.4	175.942.778.154,22	175.318.953.803,81	99,65	171.836.046.268,25
Bagi Hasil Pendapatan	6.3.2.4.1	9.484.943.389,79	9.484.943.389,38	100,00	13.730.310.498,06
Bantuan Keuangan	6.3.2.4.2	166.457.834.764,43	165.834.010.414,43	99,63	158.105.735.770,19
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.650.700.646.406,31	1.506.221.682.564,41	91,25	1.450.826.439.726,43
SURPLUS/ DEFISIT		(102.859.142.801,55)	19.714.223.127,66	(19,17)	11.187.909.129,37
PEMBIAYAAN DAERAH	6.3.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.3.3.1	125.644.340.402,55	125.239.937.529,69	99,68	142.694.804.190,82
Penggunaan SILPA	-	125.644.340.402,55	125.188.456.552,69	99,64	142.665.297.190,82
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	51.480.977,00	-	9.507.000,00

Uraian	Reff. CaLK	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2016
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pernyataan Modal Pemerintah Daerah	6.3.3.2	22.785.197.601,00	22.771.070.518,64	99,94	28.248.372.917,64
Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga		3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00
		19.185.197.601,00	19.171.070.518,64	99,93	23.748.372.917,64
JUMLAH PEMBIAYAAN BERSIH		102.859.142.801,55	102.468.867.011,05	99,62	114.446.431.273,18
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	6.3.4	-	122.183.090.138,71		125.644.340.402,55

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
NERACA
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Reff CaLK	Tahun 2017 Audited	Tahun 2016
ASET	6.1.1	1.543.062.430.875,70	1.472.028.534.807,33
ASET LANCAR	6.1.1.1	195.368.290.118,89	204.507.613.188,10
Kas di Kas Daerah	6.1.1.1.1	107.201.056.359,84	118.968.370.356,36
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.1.1.1.2	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	6.1.1.1.3	88.108.990,00	187.741.882,76
Kas di Bendahara BLUD	6.1.1.1.4	2.926.579.789,00	3.131.930.393,54
Kas di Bendahara JKN	6.1.1.1.5	8.831.301.662,33	1.541.936.233,38
Kas di Bendahara BOS	6.1.1.1.6	1.793.348.663,70	2.008.315.919,27
Kas di Peduli Gunung Agung Karangasem	6.1.1.1.7	50.000,00	-
Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana	6.1.1.1.8	1.342.644.673,84	-
Piutang Pajak	6.1.1.1.9	58.445.521.641,74	51.445.499.827,65
Penyisihan Piutang Pajak	6.1.1.1.10	(21.062.880.786,16)	(16.924.984.803,22)
Piutang Retribusi	6.1.1.1.11	100.078.778,00	809.957.726,00
Penyisihan Piutang Retribusi	6.1.1.1.12	(10.977.658,31)	(8.109.477,26)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		-	103.612.800,00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		-	(1.038.128,00)
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi	6.1.1.1.13	8.962.032.741,47	-
Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi	6.1.1.1.14	(88.620.327,41)	-
Piutang lainnya	6.1.1.1.15	13.715.394.053,20	32.854.852.419,15
Penyisihan Piutang Lainnya	6.1.1.1.16	(402.686.523,48)	(585.858.311,43)
Belanja Dibayar Dimuka	6.1.1.1.17	23.720.833,33	45.270.833,33
Persediaan	6.1.1.1.18	13.504.617.227,80	10.930.113.516,57
Jumlah Aset Lancar		195.368.290.118,89	204.507.613.188,10
INVESTASI JANGKA PANJANG	6.1.1.2	104.049.025.463,37	100.690.653.166,02
Investasi Non Permanen	6.1.1.2.1	-	-
Dana Bergulir	6.1.1.2.2.1	290.219.129,08	341.700.106,08
Penyisihan Dana Bergulir	6.1.1.2.2.2	(290.219.129,08)	(341.700.106,08)
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	6.1.1.2.2.3	11.432.236.519,00	11.432.236.519,00
Penyisihan Investasi Dalam Proyek Pembangunan	6.1.1.2.2.4	(11.432.236.519,00)	(11.432.236.519,00)
Investasi Permanen	6.1.1.2.2	104.049.025.463,37	100.690.653.166,02
Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	6.1.1.2.2.1	104.049.025.463,37	100.690.653.166,02
Jumlah Investasi Jangka Panjang		104.049.025.463,37	100.690.653.166,02
ASET TETAP	6.1.1.3	1.231.346.825.291,29	1.157.723.672.956,24
Tanah	6.1.1.3.1	185.010.430.857,25	181.810.839.355,50
Peralatan dan Mesin	6.1.1.3.2	380.532.215.987,07	339.793.223.647,87
Gedung dan Bangunan	6.1.1.3.3	728.732.289.259,81	653.990.016.583,23
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.1.1.3.4	1.111.881.990.004,59	1.025.249.503.645,70
Aset Tetap Lainnya	6.1.1.3.5	40.100.293.900,98	35.170.718.869,98
Konstruksi dalam Pengerjaan	6.1.1.3.6	4.919.283.926,00	3.716.599.980,00
Akumulasi Penyusutan	6.1.1.3.7	(1.219.829.678.654,41)	(1.082.107.227.126,04)
Jumlah Aktiva Tetap		1.231.346.825.291,29	1.157.723.672.956,24
DANA CADANGAN	6.1.1.4	-	-
Dana Cadangan	6.1.1.4	-	-
Jumlah Dana Cadangan		-	-
ASET LAINNYA	6.1.1.5	12.298.290.002,15	9.104.595.496,97
Tagihan Penjualan Angsuran	6.1.1.5.1	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	6.1.1.5.2	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.1.1.5.3	-	-
Aset Tidak Berwujud	6.1.1.5.4	-	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	6.1.1.5.5	-	-
Aset Lain-Lain	6.1.1.5.6	12.298.290.002,15	9.104.595.496,97
Jumlah Aset Lainnya		12.298.290.002,15	9.104.595.496,97
JUMLAH ASET		1.543.062.430.875,70	1.472.028.534.807,33
KEWAJIBAN	6.1.2	22.769.968.859,64	73.280.557.672,04
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.1.2.1	22.573.659.482,99	72.953.375.377,75
Utang Perhitungan Pihak ketiga	6.1.2.1.1	-	6.212.500,00
Utang Bunga	6.1.2.1.2	-	647.662.353,01
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	6.1.2.1.3	130.872.917,64	19.171.070.518,64
Pendapatan Diterima Dimuka	6.1.2.1.4	64.760.833,33	38.047.708,33
Utang Belanja	6.1.2.1.5	22.378.025.732,02	53.090.382.297,77
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		22.573.659.482,99	72.953.375.377,75

